Hukum acara pidana:

1. Terhadap perkara, dimana terdakwa (tertuduh dibebaskan dari segala tuduhan, tidak dapat diajukan banding (U.U. 1/1950 fasal 6 ayat 2).
2. Seharusnya Pengadilan Tinggi dalam perkara ini menyatakan banding tidak dapat diterima. Karena permohonan banding tidak disertai dengan suatu bantahan terhadap pembebasan tersebut.

**PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
TANGGAL 16 MEI 1973 No. 22 K/Kr/1970.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PUTUSAAN
MAHMAMAH AGUNG**

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Gorontalo tanggal 7 Juli 1965 No.1/1965 HN. dalam putusan mana para tertuduh:

- I. **BAHRUDDIN KUMADJI**, umur 37 tahun, lahir di kg. Limba B tinggal di kg.Talumolo Kotapraja Gorontalo, pekerjaan Pegawai Pusat Koperasi Kopra Dati II Gorontalo;
- II. **SODE IBRAHIM**, umur 42 tahun, lahir dikg. Ipilo, tinggal di kg.Tamalate Kotapraja Gorontalo, pekerjaan Pegawai Pusat Koperasi Kopra Dati II Gorontalo;
- III. **HUSUNA DILATO**, umur 63 tahun, lahir dikg. Mongolato Telaga, Dati II. Gorontalo, tinggal di kg. Limba U Kotapraja Gorontalo, pekerjaan Pegawai Pusat Koperasi Kopra Gorontalo;
- IV. **MOKI DJAFAR**, umur 50 tahun, lahir di kg.Bongo, tinggal di kg. Tenda Kotapraja Gorontalo, pekerjaan Pegawai Pusat Koperasi Kopra Dati II. Gorontalo;
- V. **SOLEMAN DENGO**, umur 37 tahun, lahir di kg. Limba B, tinggal di kg. Biawao Kotapraja Gorontalo, pekerjaan berdagang;
- VI. **EDY KARIM**, umur 37 tahun, lahir dan tinggal di kg. Lekobalo, Kotapraja Gorontalo, pekerjaan berdagang; para tertuntut kasasi (berada di luar tahunan);

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh: Terhadap terdakwa I, Baharuddin Kumadji:

Utama I.

bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya pada atau kira-kira tanggal 22 Oktober 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam tahun itu juga, di kantor P.K.K. Dati II Gorontalo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo, dengan sengaja, serta dengan maksud memperkaya dirinya sendiri atau orang lain selain dia, telah mengambil uang sejumlah Rp.1.683.500 uang mana milik P.K.K. Dati II Gorontalo, ataupun milik suatu badan Hukum lain yang mempergunakan modal itu dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat, dengan jalan menyalah-gunakan jabatannya serta kedudukannya, sehingga oleh perbuatan mana, mengakibatkan kerugian bagi PKK Dati II Gorontalo ataupun merugikan perekonomian Negara atau daerah atau badan lain yang menerima bantuan dari masyarakat tersebut sebanyak Rp.1.683.500 ataupun lebih dari Rp.250,—

PENGGANTI a:

Bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya, pada tanggal 22 Oktober 1963 dan tanggal 21 Oktober 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam tahun itu juga, di kantor P.K.K. Dati II Gorontalo, ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo, dengan sengaja dan dengan direncanakan telah membuat surat palsu atau yang dipalsukan yakni kwitansi tertanggal 22 Oktober 1963 sejumlah uang Rp.3.156.200, dan tanda penerimaan tertanggal 21 Oktober 1963 No.46 dengan maksud dipergunakannya ataupun menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah kwitansi tersebut asli dan tidak dipalsukan, sehingga oleh perbuatan mana menimbulkan kerugian terhadap P.K.K. Dati II Gorontalo sebanyak Rp.1.683.500,— atau pun lebih dari Rp.250,—

PENGGANTI b:

Bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya, pada tanggal, bulan, tahun, seperti pada tuduhan Utama I di atas, di kantor P.K.K. Dati II Gorontalo, ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo, dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hak uang sejumlah Rp.1.683.500,— uang mana milik P.K.K. Dati II Gorontalo ataupun milik orang lain selain dia, sedangkan uang mana berada dalam tangannya bukan karena kejahatan sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut merugikan kepada P.K.K. Dati II Gorontalo, sebanyak Rp.1.683.500,— atau lebih dari Rp.250,—

II.

Bahwa ia terdakwa sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya, pada tanggal 16 Oktober 1963, berikut pada tanggal 19 Oktober 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam tahun itu juga, di kantor P.K.K. Dati II Gorontalo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo, dengan sengaja ataupun direncanakan lebih dahulu, telah

membuat atau menyuruh membuat surat palsu atau yang dipalsukan yaitu tanda-tanda penerimaan yaitu tanda penerimaan sementara tertanggal 16 Oktober 1963 sejumlah 1590 lembar karong dan tanda penerimaan sementara tertanggal 19 Oktober 1963 sejumlah 4140 lembar karong, dengan maksud dipergunakannya ataupun menyuruh orang lain mempergunakannya, seolah-olah tanda-tanda penerimaan tersebut asli dan tidak dipalsukan sehingga oleh perbuatannya menimbulkan kerugian bagi P.K.K. Dati II Gorontalo sebanyak Rp.500.000,- + Rp.1.683.500,- = Rp.2.183.500,- atau lebih dari Rp.250,-

PENGGANTI:

Bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya pada tanggal 17 Oktober 1963 berikut pada tanggal 22 Oktober 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam tahun itu juga, di kantor PKK Dati II Gorontalo, ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo, dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hak uang sejumlah Rp.2.183.500,-, uang mana adalah milik PKK. Dati II Gorontalo ataupun milik orang lain selain P.K.K. Dati II Gorontalo sedangkan uang mana beradalah dalam tangannya bukan karena kejahatan, sehingga oleh perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian kepada PKK Dati II Gorontalo sebanyak Rp.2.183.500,- ataupun lebih dari Rp.250,-

III.

bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya pada tanggal 17 Oktober 1963, tanda penerimaan sementara tertanggal 16 Oktober 1963, no.44, berikut pada tanggal 22 Oktober 1963, tanda penerimaan tertanggal 21 Oktober 1963 no.46 ataupun pada suatu hari lain dalam tahun itu juga, di kantor PKK Dati II Gorontalo, ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo, serta dengan maksud memperkaya sendiri ataupun orang lain selain dia, telah mengambil uang sejumlah Rp.2.183.500,- uang mana milik PKK Dati II Gorontalo ataupun milik suatu badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat dengan jalan menyalah-gunakan jabatannya serta kedudukannya, sehingga oleh perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian kepada PKK Dati II Gorontalo ataupun merugikan perekonomian Negara ataupun daerah atau badan lain yang menerima bantuan dari keuangan negara ataupun badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat tersebut sebanyak Rp.2.183.500,- ataupun lebih dari Rp.250,-

IV.

bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya, pada tanggal 14 Oktober 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam tahun itu juga, di kantor PKK Dati II Gorontalo ataupun pada

suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo, dengan sengaja membuat surat palsu atau yang dipalsukan, yakni paktur no,216/2 tertanggal 14 Oktober 1963 sejumlah 1385 lembar karong atas nama lelaki Tony Ginsu atau orang lain selain dia, dengan maksud dipergunakannya ataupun menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah faktur tersebut asli dan tidak dipalsukan, sehingga oleh perbuatannya mengakibatkan kerugian kepada P.K.K. Dati II Gorontalo sebanyak Rp.304.700,— ataupun lebih dari Rp.250,—

PENGGANTI:

bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya, pada tanggal 14 Oktober 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam tahun itu juga, di kantor PKK. Dati II Gorontalo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hak uang sejumlah Rp.304.700,— uang mana adalah milik PKK Dati II Gorontalo ataupun milik orang lain selain dari PKK Dati II Gorontalo, sedangkan uang mana berada dalam tangannya bukan karena kejahatan, sehingga oleh perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian kepada PKK Dati II Gorontalo sebanyak Rp.304.700,— ataupun lebih dari Rp.250,—

V.

bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya, pada tanggal 17 Mei 1962 berikuit pada tanggal 29 April 1963, ataupun pada suatu hari lain dalam tahun 1962 dan tahun 1963 di kantor PKK Dati II Gorontalo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo, dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hak uang sejumlah Rp.69.500,— uang mana adalah harga 470 lembar karong dan 720 lembar karong milik PKK Dati II Gorontalo yang dijual oleh terdakwa tersebut kepada lelaki Edy Karim ataupun orang lain selain dia, sedangkan uang mana berada dalam tangannya terdakwa bukan karena kejahatan, sehingga oleh perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian kepada PKK Dati II Gorontalo sejumlah Rp.69.500,— ataupun lebih dari Rp.250,—

Terhadap terdakwa II. Sode Ibrahim: Utama I:

bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama terdakwa lainnya, pada tanggal 21 Oktober 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam tahun itu juga, di gudang PKK Dati II Gorontalo di Talumolo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo, dengan sengaja telah membuat surat palsu ataupun dipalsukan, yakni tanda penerimaan sementara tertanggal 21 Oktober 1963 no.46 dengan maksud dipergunakannya ataupun menyuruh orang lain mempergunakannya, seolah-olah tanda penerimaan tersebut

asli dan tidak dipalsukan, sehingga oleh perbuatan mana telah mengakibatkan kerugian kepada PKK Dati II Gorontalo sejumlah Rp.1.683.500,- atau lebih dari Rp.250,-

Pengganti:

bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya pada tanggal 22 Oktober 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam tahun itu juga, di kantor PKK Dati II Gorontalo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hak uang sejumlah Rp.1.683.500,- uang mana adalah selisih harga dari 8950 lembar karong dalam tanda penerimaan tertanggal 21 Oktober 1963 dikurangi dengan 4140 lembar dalam tanda penerimaan sementara tertanggal 19 Oktober 1963, sedang uang mana pula berada dalam tangannya terdakwa bukan karena kejahatan, sehingga oleh perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian kepada P.K.K. Dati II Gorontalo sebanyak Rp.1.683.500,- ataupun lebih dari Rp.250,-

II.

bahwa ia terdakwa sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya di gudang P.K.K. Dati II Gorontalo di Talumolo, ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo, pada tanggal 16 Oktober 1963, berikut pada tanggal 19 Oktober 1963 berikut pada tanggal 6 Nopember 1963, berikut pada tanggal 11 Nopember 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam tahun 1963 dengan sengaja telah membuat surat palsu atau yang dipalsukan yakni tanda penerimaan-penerimaan sementara tertanggal 16 Oktober 1963, sejumlah 1590 lembar karong, berikut tanda penerimaan sementara tertanggal 19 Oktober 1963 sejumlah 8950 lembar karong berikut tanda penerimaan sementara tertanggal 6 Nopember 1963 sejumlah 4130 lembar karong berikut tanda penerimaan sementara tertanggal 11 Nopember 1963 sejumlah 6560 lembar karong dengan maksud dipergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah tanda penerimaan-penerimaan sementara tersebut asli dan tidak dipalsukan, sehingga oleh perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian kepada P.K.K. Dati II Gorontalo sejumlah Rp.3.383.500,- ataupun lebih dari Rp.250,-

PENGGANTI:

bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya di gudang P.K.K. Dati II Gorontalo di Talumolo pada tanggal 16 Oktober 1963 berikut pada tanggal 19 Oktober 1963 berikut pada tanggal 6 Nopember 1963, berikut pada tanggal 11 Nopember 1963 ataupun pada suatu hari dalam tahun 1963 dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hak sejumlah 1590 + 4140 + 4130 + 6560 lembar karong mana berada dalam tangannya terdakwa bukan karena kejahatan,

sehingga oleh perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian kepada P.K.K. Dati II Gorontalo sebanyak Rp.3.383.000,- ataupun lebih dari Rp.250,-

III.

bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa lainnya di gudang P.K.K. Dati II Gorontalo di Talumolo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo, pada tanggal dan tahun 1962 serta tahun 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam tahun 1962 dan tahun 1963, dengan sengaja dan dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain selain dia, dengan melawan hak telah membujuk Administrateur PKK Dati II Gorontalo dengan jalan memakai keadaan palsu serta perkataan-perkataan bohong dalam melaporkan karong-karong milik PKK Dati II Gorontalo yang masih dalam keadaan baik sebagai karung-karung afkeur, sehingga oleh perbuatannya terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian kepada PKK Dati II Gorontalo sebesar Rp.485.000,- ataupun lebih dari Rp.250,-

Terdakwa terdakwa III. Husana Dilato.

Utama I:

bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa lainnya di gudang PKK Dati II Gorontalo di Talumolo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo diantara tahun 1962 dan tahun 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam peredaran tahun 1962 dan tahun 1963 dengan sengaja dan dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri, atau orang lain selain dia, dengan melawan hak telah membujuk administrateur PKK Dati II Gorotalo dengan jalan memakai keadaan palsu serta perkataan-perkataan bohong dalam melaporkan karung-karung milik PKK Dati II Gorontalo yang masih dalam keadaan baik sebagai karung-karung yang afkeur, sehingga oleh perbuatannya mengakibatkan kerugian kepada PKK Dati II Gorontalo sebanyak Rp.485.000,- ataupun lebih dari Rp.250,-

II.

bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya pada tanggal 11 Nopember 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam tahun 1963 di gudang P.K.K. Dati II Gorontalo di Talumolo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo, dengan sengaja telah membuat surat palsu atau yang dipalsukan yakni tanda penerimaan sementara tertanggal 11 Nopember 1963 sejumlah 6560 lembar karong dengan maksud dipergunakannya seolah-olah tanda penerimaan sementara tersebut asli dan tidak dipalsukan, sehingga oleh perbuatannya terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian kepada PKK Dati II Gorontalo sejumlah Rp.199.500,-

Pengganti:

bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya pada tanggal 11 Nopember 1963, di gudang PKK Dati II Gorontalo di Talumolo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hak sejumlah 6560 lembar karong yang tercantum dalam tanda penerimaan sementara tertanggal 11 Nopember 1963 karong mana adalah milik PKK Dati II Gorontalo yang dibeli dari Soleman Dengo atau orang lain selain dia, sedang karong mana berada dalam tangannya bukan karena kejahatan, sehingga oleh perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian kepada PKK Dati II Gorontalo sebanyak 6560 kali @ Rp.350,- per lembar = Rp.2.296.000,- ataupun lebih dari Rp.250,-

Terhadap terdakwa IV. Moki Djaafar:

Utama I:

bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya, pada tanggal 21 Oktober 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam tahun itu juga, di gudang PKK Dati II Gorontalo di Talumolo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo, dengan sengaja telah membuat surat palsu ataupun yang dipalsukan yakni tanda penerimaan tertanggal 21 Oktober 1963 no.46, dengan maksud dipergunakannya ataupun menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah tanda penerimaan tersebut asli dan tidak dipalsukan sehingga oleh perbuatan terdakwa mana mengakibatkan kerugian kepada PKK Dati II Gorontalo sejumlah Rp.1.683.500,- ataupun lebih dari Rp.250,-

Pengganti :

bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya pada tanggal 21 Oktober 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam tahun 1963 di gudang PKK Dati II Gorontalo di Talumolo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hak uang sebesar Rp. 1.683.500,- sebagaimana yang tercantum dalam tanda penerimaan sementara tt. 21 Oktober 1963 No. 46, uang mana adalah milik PPK Dati II Gorontalo ataupun milik badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat, sehingga oleh perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian kepada PKK Dati II Gorontalo sebesar Rp.1.683.500 atau lebih dari Rp. 250,-

II.

bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya, pada tanggal 16 Oktober 1963 berikut pada tanggal 19 Oktober 1963 di gudang PKK Dati II Gorontalo di Talumolo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo dengan sengaja telah membuat surat palsu atau yang dipalsukan yakni tanda penerimaan se-

mentara masing-masing tt. 16 Oktober 1963 sejumlah 1590 lembar karong, tt. 19 Oktober 1963 sejumlah 3960 lembar karong, tt 6 Nopember 1963 sejumlah 4130 lembar karong, tt.11 Nopember 1963 sejumlah 6560 lembar karong dengan maksud dipergunakan ataupun menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah tanda penerimaan-penerimaan tersebut asli dan tidak dipalsukan, sehingga oleh perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian kepada PKK Dati II Gorontalo sejumlah Rp. 3.383.000,- atau lebih dari Rp. 250,-

III.

bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya, pada peredaran tahun 1962 dan tahun 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam tahun-tahun tersebut di gudang PKK Dati II Gorontalo di Talumolo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo, dengan sengaja dan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain selain dia, dengan melawan hak telah membujuk administrateur PKK Dati II Gorontalo dengan jalan memakai keadaan palsu serta dengan perkataan-perkataan bohong dalam melapurkan karung milik PKK Dati II Gorontalo yang masih dalam keadaan baik sebagai karung-karung yang afkeur, sehingga oleh perbuatannya terdakwa mengakibatkan kerugian kepada PKK Dati II Gorontalo sebanyak Rp. 485.000,- ataupun lebih dari Rp. 250,-

Terhadap terdakwa V. Soleman Dengo:

Utama I:

bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya pada peredaran tahun 1962 dan tahun 1963 ataupun pada suatu hari dalam tahun-tahun tersebut di kantor P.K.K. Dati II Gorontalo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo, dengan sengaja serta dengan bersekongkol dengan terdakwa-terdakwa lainnya telah membeli atau menyimpan serta menyembunyikan karong-karong milik P.K.K. Dati II Gorontalo dengan maksud mendapatkan untung, sedang diketahuinya atau patut disangkakan bahwa karong-karong tersebut diperolehnya dengan jalan kejahatan, di mana oleh perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian kepada P.K.K. Dati II Gorontalo, sebanyak Rp. 469.625,- atau lebih dari Rp. 250,-

II.

Bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya pada tanggal 22 Oktober 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam tahun itu juga di kantor P.K.K. Dati II Gorontalo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo, dengan sengaja telah membuat surat palsu atau yang dipalsukan yakni kwitansi tertanggal 22 Oktober 1963 sejumlah Rp. 3.156.200,- uang mana adalah harga 8950 lembar karong dalam tanda penerimaan tertanggal 21 Oktober 1963 sedangkan terdakwa mengetahui atau patut dapat disangkanya bahwa jumlah karong 8950 lembar tersebut sebenarnya tidak ada, sedangkan kwitansi mana dipergunakannya ataupun

menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah kwitansi tersebut asli dan tidak dipalsukan sehingga pula oleh perbuatannya terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi P.K.K. Dati II Gorontalo sebanyak Rp. 1.683.500,— atau lebih dari Rp. 250,—

Terhadap terdakwa VI: EDY KARIM.

Bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya pada tanggal 17 Mei 1962 berikut pada tanggal 29 April 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam peredaran tahun 1962 dan tahun 1963 di gedung P.K.K. Dati II Gorontalo di Kwandang ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hak sejumlah Rp 470,— + 720 lembar karong, karong mana adalah milik P.K.K. Dati II Gorontalo yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan sehingga oleh perbuatannya terdakwa mengakibatkan kerugian kepada P.K.K. Dati II Gorontalo sebesar Rp. 89.250,— ataupun lebih dari Rp. 250,—

dengan memperhatikan pasal 313, 378 R.I.J.B. telah dibebaskan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerangkan kesalahan dari terdakwa-terdakwa pada awalan ini :

- I. Baharuddin Kumadji.
- II. Sode Ibrahim
- III. Husada Dilato
- IV. Moki Djaafar
- V. Soleman Dengo
- VI. Edy Karim.

tiada terang syah sepanjang hukum dan keyakinan;

Membebaskan mereka lantaran itu dari tuduhan-tuduhan yang dipertanggungkan kepada mereka;

Mempertanggungkan biaya dalam perkara ini kepada Negeri;

Memerintahkan pengembalian tanda-bukti sejumlah 7030 lembar karong kepada yang berhak atasnya yakni terdakwa V. Soleman Dengo, serta buku-buku kas dan bundelan surat-suratan dikembalikan kepada Pusat Koperasi Dati II Gorontalo putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Makassar dengan putusannya tanggal 2 Nopember 1967 No. 9/1966/PT.Pid. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Gerson Bawnoh, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Gorontalo tersebut;

Membatalkan seluruh putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 7 Juli 1965 No. 1/1965/H.N.Pid. tersebut:

Mengadili sendiri :

1. Membatalkan seluruh tuduhan yang dilimpahkan kepada para terdakwa dalam perkara ini yaitu terhadap:
terdakwa I bernama :
 - a. Bahruddin Kumadji, tuduhan: Utama I, pengganti a, pengganti b, II pengganti III, IV, pengganti V tersebut;
 - b. terdakwa II Sode Ibrahim, tuduhan-tuduhan Utama I, pengganti II, Pengganti III tersebut;
 - c. terdakwa III Rusana Dilato, tuduhan: Utama I, II dan II pengganti, tersebut;
 - d. terdakwa IV Moki Djaafar, tuduhan: Utama I, pengganti II, III tersebut;
 - e. terdakwa V Soleman Denggo, tuduhan: Utama I, II tersebut;
2. Membatalkan seluruh berita acara pemeriksaan Pengadilan Negeri Gorontalo di dalam perkara para terdakwa tersebut;
3. Menetapkan biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding akan dipikul oleh Negara;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 1/1965 H.N. Pidana yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri di Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juni 1968 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Gorontalo telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 5 Juni 1968 dari Jaksa sebagai penuntut kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Gorontalo pada tanggal 14 Juni 1968;

Melihat surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950) dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indo-

nesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950) tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Gorontalo akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi Jabatan, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (party cassatie);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut-kasasi pada tanggal 3 Juni 1968 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 1968 serta risalah kasasinya telah diterima pada tanggal 14 Juni 1968, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

bahwa Pengadilan Tinggi Makassar tidak melaksanakan fasal 250 ayat 1 H.I.R., di mana dinyatakan ada kemungkinan diadakan perubahan, vide fasal 282 H.I.R.;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat; bahwa keberatan di atas tidak dapat dibenarkan karena mengenai hal tersebut Pengadilan Tinggi sudah tepat;

Menimbang bahwa namun demikian permohonan kasasi harus diterima atas dasar alasan-alasan lain yaitu karena seharusnya Pengadilan Tinggi menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima sebab putusan Pengadilan Negeri merupakan suatu pembebasan sedangkan permohonan banding tidak disertai dengan sesuatu bantahan terhadap pembebasan tersebut atas dasar alasan bahwa pembebasan tersebut bukan suatu pembebasan murni tetapi adalah suatu pelepasan dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Makassar tanggal 2 Nopember 1967 No. 9/1966/P.T. harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tinggi di Makassar tersebut dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut;

Memperhatikan pasal 21 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi; Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Gorontalo tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Makassar tanggal 2 Nopember 1967 No. 9/1966/PT.;

Mengadili sendiri;

Menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat ini kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari SENIN tanggal 2 April 1973 oleh Prof. Subekti SH. Ketua, Busthanul Arifin SH. dan Z. Asikin Kusumah Atmadja SH. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari RABU tanggal 16 Mei 1973 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Busthanul Arifin SH. dan Z. Asikin Kusumah Atmadja SH. Hakim-hakim Anggota, dihadiri oleh Basaroe'ddin SH. Jaksa Agung Muda dan dihadiri oleh Lintong O. Siahaan SH. Panitera pengganti L.B., serta tidak dihadiri oleh para penuntut kasasi.

Anggota-anggota:

ttd. Busthanul Arifin S.H.

ttd. Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

K e t u a :

ttd. Prof. Subekti SH.

Panitera-Pengganti l.b.:
ttd. Lintong O. Siahaan S.H.

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR No. 9/1966/P.T./Pid.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:

Pengadilan Tinggi di Makassar bersidang dengan Hakim-Tunggal mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan keputusan sebagai tertera di bawah ini, dalam perkaranya:

- I. **BAHRUDDIN KUMADJI**, umur 37 tahun, lahir di kampung Limbau, tinggal di kampung Talumolo Kotapraja Gorontalo, pekerjaan Pegawai Pusat Koperasi Kopra Dati II Gorontalo, berada dalam tahanan sejak tanggal 2 Juli 1964 s/d tanggal 22 Januari 1965, kini berada di luar tahanan;
- II. **SODE IBRAHIM**, umur 43 tahun lahir di kampung Ipilo, tinggal di kampung Tamalate Kotapraja Gorontalo, pekerjaan pegawai Pusat Koperasi Kopra Dati II Gorontalo, berada dalam tahanan sejak tanggal 1 Juli 1964 s/d tanggal 22 Januari 1965, kini berada di luar tahanan;
- III. **HUSANA DILATO**, umur 63 tahun, lahir di kampung Mongelato Telaga, Dati II Gorontalo, tinggal di kampung Limba U Kotapraja Gorontalo, pekerjaan pegawai Pusat Koperasi Kopra Dati II Gorontalo - berada dalam tahanan sejak tanggal 1 Juli 1964 s/d tanggal 22 Januari 1965, kini berada di luar tahanan;
- IV. **MOKI DJAAFAR**, umur 50 tahun. lahir di kampung Bongo tinggal di kampung Tenda Kotapraja Gorontalo, pekerjaan pegawai Pusat Koperasi

si Kopra Dati II Gorontalo, berada dalam tahanan sejak tanggal 1 Juli 1964 s/d tanggal 22 Januari 1965 kini berada di luar tahanan;

V. SOLEMAN DENGO, umur 37 tahun, lahir di kampung Limba B, tinggal di kampung Biawae Kotapraja Gorontalo, pekerjaan berdagang karung, berada dalam tahanan sejak tanggal 29 Juni 1964 s/d tanggal 24 Januari 1965, kini berada di luar tahanan;

VI. EDY KARIM, umur 37 tahun, lahir dan tinggal di kampung Lekobalo Kotapraja Gorontalo, pekerjaan berdagang karung, berada dalam tahanan sejak tanggal 6 Juli 1964 s/d tanggal 29 Januari 1965, kini berada di luar tahanan;

para terdakwa kesemuanya di hadapan sidang dibela oleh Sdr. Abdurrachman Daeng Sisila;

Telah membaca:

1. surat-surat pemeriksaan serta keputusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri di Gorontalo, tertanggal 7 Juli 1965 No. 1/1965 NN-Pid, dalam perkara terdakwa-terdakwa tersebut yang pokok putusannya berbunyi:

"Menerangkan kesalahan dari terdakwa-terdakwa pada awalan ini;

- I. Bahruddin Kumadji,
- II. Sode Ibrahim,
- III. Husana Dilato,
- IV. Moki Djaafar,
- V. Soleman Dengo,
- VI. Edy Karim,

tiada terang syah sepanjang hukum dan keyakinan;

"Membebaskan mereka lantaran itu dari tuduhan-tuduhan yang dipertanggungkan kepada mereka;

"Mempertanggungkan biaya dalam perkara ini kepada Negara;

"Memerintahkan pengembalian tanda bukti sejumlah 7030 lembar karung kepada yang berhak atasnya yakni terdakwa V Soleman Dengo, serta buku-buku kas dan bundelan surat-suratan dikembalikan kepada Pusat Koperasi Kopra Dati II Gorontalo;

2. surat catatan yang dibuat oleh Panitera-Pengganti pada Pengadilan Negeri di Gorontalo yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Juli 1965, penuntut umum mengajukan permohonan agar supaya terdakwa-terdakwa diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;

3. memori banding yang diajukan oleh Gerson Bawueh, Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Gorontalo, tertanggal 30 Juli 1965;

Menimbang, bahwa karena yang meminta pemeriksaan banding dalam perkara ini adalah Penuntut Umum, maka perlulah ditinjau apakah di bawah naungan Undang-undang Pokok tentang kekuasaan Kehakiman sekarang ini (Undang-undang No. 19/1964 Lembaran Negara tahun 1964 No. 1/7) permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa ketentuan soal permintaan banding ini diatur dalam:

- a. Undang-undang tentang kesatuan susunan kekuasaan dan acara Pengadilan Sipil pasal 6 ayat 2 dan
- b. Undang-undang pokok tentang kekuasaan Kehakiman tersebut di atas pasal 14;

Menimbang, bahwa pasal 29 dari Undang-undang No. 19/1964 tersebut menentukan tidak berlakunya semua peraturan yang mengatur ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman yang bertentangan (tebal oleh Pengadilan Tinggi) dengan Undang-undang ini (Undang-undang No. 19/1964);

Menimbang, bahwa soal banding termasuk bidang kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pasal 6 ayat 2 dari Undang-undang tersebut sub a di atas hanya mengenal satu pembatasan terhadap wewenang penuntut Umum untuk meminta banding yaitu jika putusan (Pengadilan Negeri) itu tidak mengandung pembebasan dari tuntutan seluruhnya";

Menimbang, bahwa ini berarti kecuali dalam hal pembatasan tersebut di atas terhadap semua putusan pidana dari Pengadilan Negeri dapat dijatuhkan banding oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Pokok tentang kekuasaan Kehakiman yang sekarang ditentukan dalam pasal 14 ayat 2 sebagai berikut:

1. "untuk menegakkan hukum sebagai alat revolusi dan/atau untuk memenuhi keadilan masyarakat, Penuntut Umum berhak meminta banding terhadap setiap putusan mengenai perkara-perkara kejahatan tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang;
2. Sedang dalam penjelasannya disebutkan contoh-contoh dalam hal apa penuntut umum dapat meminta banding, yaitu dalam perkara-perkara kejahatan-kejahatan yang berat, seperti perkara-perkara subversi, kontra revolusi, korupsi besar dan lain lain juga dalam hal putusan itu memuat pembebasan tertuduh dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa dengan begitu ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-undang tersebut sub a. di atas mengandung pertentangan/perbedaan terhadap pasal 14 ayat 2 undang-undang tentang kekuasaan Kehakiman tersebut, dalam arti: Pembebasan tersebut menunjuk kepada isi putusan sedang yang terakhir dalam Undang-undang pokok tentang kekuasaan Kehakiman menunjuk kepada macam perkara/sifat perkara;

Menimbang, bahwa ketentuan dari pasal 14 ayat 2 tersebut yang berbunyi "Untuk menegakkan hukum sebagai alat revolusi dan/atau memenuhi rasa keadilan masyarakat, Penuntut Umum berhak meminta banding terhadap setiap putusan mengenai perkara tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang

Menimbang, bahwa tetapi sudahlah jelas diuraikan dalam penjelasan Undang-undang tersebut, bahwa "hanya" dalam hal perkara-perkara kejahatan yang berat seperti perkara subversi, kontra revolusi, korupsi besar dan lain-lain kejahatan dari musuh-musuh revolusi atau yang membawa akibat yang luas dalam masyarakat, penuntut Umum demi menegakkan hukum sebagai alat revolusi dan/atau untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dibolehkan meminta banding atas putusan Pengadilan Negeri, walaupun putusan itu mengandung pembebasan tertuduh dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa dengan begitu sekalipun Undang-undang yang khusus yang menentukan terhadap putusan-putusan Pengadilan Negeri yang mana yang boleh dimintakan banding sebagaimana yang dimaksud di atas belum ada, dapatlah dianggap bahwa apa yang telah dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang No. 19/1964 tersebut sudah merupakan suatu ketentuan pengkhususan yang dapat dipakai sebagai pegangan untuk menilai perkara kejahatan yang manakah dapat dianggap sebagai perkara kejahatan yang cukup berat/ yang merupakan kejahatan dari musuh-musuh revolusi atau yang membawa akibat yang luas dalam masyarakat, sehingga karenanya kepada penuntut umum diberi kemungkinan untuk meminta banding terhadap putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dituduhkan kepada terdakwa-terdakwa dalam perkara ini adalah perbuatan pidana, yang melihat besarnya uang Negara yang tersangkut, dapat digolongkan dalam perkara kejahatan korupsi besar (tuduhan pasal 415 KUHP menurut Undang-undang tindak pidana korupsi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu sekalipun putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan berupa pembebasan terdakwa dari seluruh tuduhan, toch permintaan banding dari Jaksa dalam hal ini harus diterima;

Menimbang, bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang mengakui dan melindungi hak-hak azasi manusia;

Menimbang, bahwa hal tersebut di dalam bidang Peradilan dilaksanakan antara lain dengan azas:

1. bahwa seorang terdakwa dianggap sebagai tidak bersalah sebelum di jatuhkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
2. bahwa hukum acara Pidana kita menganut sistim accusateir yang menganggap seseorang terdakwa sebagai subyek yang didakwa berhadapan dengan pihak yang mendakwa (Pemerintah cq. Kepolisian, Penuntut Umum) sedemikian rupa sehingga kedua pihak tersebut masing-masing mempunyai hak-hak yang sama nilainya;

Menimbang, bahwa di samping itu harus diingat adanya kenyataan :

1. bahwa sebahagian terbesar dari para terdakwa (termasuk para terdakwa

dalam perkara sekarang ini) yang diajukan ke Pengadilan (bahkan boleh dikata sebagian terbesar dari seluruh rakyat Indonesia) tidak mengetahui atau sedikit sekali pengetahuannya tentang hak-hak azasi manusia, maupun lika-liku hukum acara Pidana kita tersebut.

2. bahwa dengan begitu merekapun boleh dikata hampir tidak mengetahui hak-hak apa yang dapat digunakannya di dalam membela diri dalam kedudukannya sebagai seorang terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu di dalam pelaksanaan Peradilan yang bebas di dalam Negara kita jiwa dari azas-azas tersebut sejauh mungkin harus direalisasikan di dalam setiap tingkatan proses pidana yang berjalan, sehingga pada taraf suatu perkara pidana diserahkan kepersidangan Pengadilan pun yang dilakukan dengan suatu akte penyerahan perkara yang memuat individualisasi dari perbuatan-perbuatan pidana yang dituduhkan kepada seorang terdakwa, harus pula dengan jelas nampak direalisasikan jiwa dari pada azas-azas tersebut di atas;

Menimbang, bahwa individualisasi dari perbuatan-perbuatan pidana yang dituduhkan kepada seorang terdakwa dalam suatu surat tuduhan diatur secara umum dalam pasal 250 ayat 4 HIR dengan rumusan umum yang berbunyi:

"..... ter vermelding van de feiten, welke ten laste gelegd worden alles behoudes op stroffe van nietig" yang karenanya haruslah diberi arti yang sesuai dengan pelaksanaan dari jiwa azas-azas tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adanya seseorang diajukan sebagai terdakwa di muka Pengadilan adalah disebabkan karena:

1. Ia pada waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu telah tidak melakukan perbuatan-perbuatan, tingkah laku-tingkah laku, sikap sikap tertentu.
2. dengan melakukan/tidak melakukan hal-hal tersebut diatas oleh pihak Penuntut Umum dianggap sebagai telah memenuhi semua unsur-unsur dari satu atau lebih perbuatan pidana tertentu yang nyata-nyata diatur dalam suatu peraturan perundangan dan diancam dengan suatu hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu suatu surat tuduhan yang fungsi pokoknya adalah individualisasi dari perbuatan-perbuatan pidana yang dituduhkan kepada terdakwa (sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 250 ayat 4 HIR haruslah secara lengkap, dan jelas/tidak meragu-ragukan mengandung kedua hak tersebut di atas, sehingga bagi terdakwa ada suatu kepastian sebagai pegangan tentang:

1. Perbuatan-perbuatan, tingkah laku-tingkah laku, sikap-sikap (positif dan negatif) apa saja yang didakwakan telah dilakukan dan
2. Unsur-unsur dari delik-delik pidana yang mana yang karena perbuatan-

perbuatan, tingkah laku-tingkah laku dan sikap-sikap tersebut telah dipenuhi yang karenanya telah melanggar suatu norma hukum yang diatur dan diancam dengan suatu hukuman oleh suatu peraturan perundang-undangan yang tertentu;

Menimbang, bahwa suatu surat tuduhan yang:

1. Hanya secara letterlyk menyebutkan unsur-unsur sesuatu delik yang pada hakekatnya hanya merupakan suatu pengkwalifikasian belaka dari perbuatan-perbuatan, tingkah laku-tingkah laku (positif negatif) yang dapat dilakukan secara umum, atau
2. Yang hanya memuat sebagian unsur-unsurnya dari delik yang bersangkutan, atau
3. Yang hanya menyebutkan apa-apa yang telah/tidak dilakukan oleh terdakwa tanpa dapat disimpulkan telah memenuhi semua unsur-unsur sesuatu delik yang bersangkutan, adalah tidak memenuhi persyaratan minimum sebagaimana yang diharuskan oleh pasal 250 ayat 4.

Menimbang, bahwa memang dalam satu bab surat tuduhan dapat dituduhkan lebih dari suatu perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri (umpama: ex pasal 338 dan pasal 340 KUHP), tetapi namun demikian syarat kelengkapan yang diharuskan oleh pasal 250 ayat 4 HIR tersebut tetap harus dipenuhi, yang berarti bahwa dalam hal demikian perbuatan pidana yang satu harus jelas dapat dibedakan dengan yang lain dan justru tidak boleh karena susunan dan uraian kata-katanya dalam surat tuduhan itu sebaliknya menjadikan tuduhan tersebut kabur, meragu-ragukan dan merupakan suatu obscur libel;

Menimbang, bahwa mengingat tuduhan-tuduhan yang dilimpahkan kepada para terdakwa dalam perkara ini adalah panjang sekali (walaupun pokok-pokok perbuatan pidana yang dituduhkan adalah korupsi, penggelapan pemalsuan dan penipuan) sedang dalam susunannya dan uraiannya simpang-siur, berbelit-belit dan sangat membingungkan, maka dalam hubungan ini untuk memperoleh pegangan dalam pemeriksaan perlulah ditinjau terlebih dahulu apakah masing-masing tuduhan tersebut telah memenuhi persyaratan-persyaratan minimum sebagaimana yang diharuskan oleh pasal 250 ayat 4 HIR;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi mutlak dari azas accusatoir dan perlindungan serta pengeterapan hak-hak azasi manusia tersebut maka tiap-tiap perbuatan pidana yang dituduhkan di dalam surat tuduhan harus paling minimum memuat apa yang dipertimbangkan di dalam nomor-nomor 2 a.b. tersebut bilamana tidak, maka tuduhan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 250 ayat 4 HIR harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa mengenai tuduhan-tuduhan yang dilimpahkan kepada

para terdakwa tersebut sebagaimana tersebut dalam surat Penetapan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 27 Maret 1965 No. 1/1965/HN, dapat dipertimbangkan hal sebagai berikut:

Terhadap terdakwa I Bahruddin Kumadji dituduhkan dalam susunan tuduhan sebagai berikut:

Utama I.

Pengganti a.

Pengganti b.

II

Pengganti

III

IV

Pengganti

V

Ad.Tuduhan utama I:

Menimbang, bahwa:

1. Walaupun jelas dan tegas penyebutan waktu dan tempat perbuatan, tetapi sebenarnya perbuatan-perbuatan pidana apa yang dituduhkan adalah tidak terang, karena:
 - a. Unsur-unsur yang tersebut di dalam tuduhan ini merupakan penggabungan dan pencampur adukan dari kejahatan-kejahatan yang diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 1 sub a, dan pasal 1 sub b dari Lembaran Negara No. 72 tahun 1960 dengan susunan yang tidak lengkap dan dengan acara mengambil sebagian dari unsur perbuatan pidana dalam pasal 1 sub a dan sebagian diambil dari perbuatan pidana dalam pasal 1 sub b; juga perbuatan-perbuatan, tingkah laku yang didakwakan telah diperbuat oleh terdakupun tidak dapat dibeda-bedakan mana yang dapat disimpulkan masuk delict pasal 1 sub a dan mana yang masuk delict pasal 1 sub b;
 2. Padahal maksud dari pasal 1 Lembaran Negara No. 72 tahun 1960 yang mengatur tindak pidana korupsi tersebut membedakan 3 (tiga) macam perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri yaitu baik sub a, sub b dan sub c masing-masing merupakan tindak-tindak pidana yang dikwalifiser dengan nama tindak pidana korupsi;
 3. Penggabungan dan pencampur adukan unsur-unsur dari dua perbuatan pidana tersebut mengakibatkan keseluruhan perbuatan pidana yang dituduhkan itu tidak lagi merupakan suatu tindak pidana yang lengkap, bulat dan konkrit yang dapat dikwalifiser sebagai tindak pidana korupsi;
 4. Susunan yang demikian justru menghasilkan "ciptaan" suatu tindakan pidana baru yang tidak dirumuskan dan diatur dalam suatu peraturan-perundang-undangan yang diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tuduhan utama I tersebut karena tidak memenuhi persyaratan minimum dari pasal 250 ayat 4 HIR, oleh karenanya haruslah dinyatakan batal;

Ad. Tuduhan pengganti a:

Menimbang, bahwa;

1. mengenai tuduhan-tuduhan ini, walaupun di belakang tuduhan ini tidak ditunjukkan pada salah satu pasal di dalam KUHP, tetapi hemat Pengadilan Tinggi kira-kira yang dimaksud adalah pasal 263 KUHP;
2. Pada hal pasal 263 KUHP, walaupun tergolong dalam perbuatan pidana yang dikwalifiser sebagai pemalsuan surat-surat tetapi pasal tersebut mengatur dua kelompok perbuatan pidana pokok yaitu:
Pada ayat 1 dan pada ayat 2
3. Tuduhan tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. waktu: 22 Oktober 1963 dan
21 Oktober 1963.
 - b. tempat: di kantor P.K.K. Dati II Gorontalo atau di lain tempat dalam daerah Gorontalo.
 - c. dengan sengaja;
 - d. dan dengan direncanakan;
 - e. telah membuat surat palsu atau yang dipalsukan (masing-masing kwitansi 22 Oktober 1963 sejumlah Rp. 3.156.200,- (tiga juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan kwitansi 21 Oktober 1963 No. 46);
 - f. dengan maksud dipergunakannya;
atau
 - g. menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah kwitansi tersebut asli dan tidak dipalsukan;
 - h. sehingga menimbulkan kerugian pada P.K.K. Dati II Gorontalo.
4. Susunan rumusan tuduhan tersebut merupakan penggabungan dan pencampur adukan lagi antara dua macam perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri dengan cara sebagaimana terjadi dengan tuduhan Utama I, baik unsur-unsurnya maupun perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa adalah tidak lengkap dan jelas (umpama: cara membuat surat palsu yang bagaimanakah yang telah diperbuat oleh terdakwa tersebut:
"dengan menyoret huruf yang pokok ataukah dengan menulis sesuatu yang sebenarnya tidak ada") dan tidak dapat dibeda-bedakan masuk delict ayat 1 atau ayat 2 dari pasal 263 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuduhan inipun pada hakekatnya tidak memenuhi persyaratan minim sebagaimana yang diharuskan oleh ketentuan pasal 250 ayat 4 HIR, dan oleh karenanya harus dibatalkan juga;

Ad. Tuduhan pengganti b:

Menimbang, bahwa mengenai tuduhan ini perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. waktu dan tempat perbuatan pidana yang dituduhkan menunjuk kepada tuduhan utama I.
2. Unsur-unsur lain yang disebutkan adalah:
 - a. dengan sengaja,
 - b. telah memiliki dengan melawan hukum,
 - c. uang sejumlah Rp. 1.683.500,- (satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
 - d. milik orang lain selain dia,
 - e. uang mana berada dalam tangannya bukan karena kejahatan.
3. Unsur-unsur tersebut seluruhnya merupakan perbuatan pidana ex pasal 372 KUHP.
4. Akan tetapi terhadap masing-masing unsur tersebut tidak disertai penjelasan-penjelasan perbuatan-perbuatan yang didakwakan nyata-nyata yang telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi masing-masing unsur pasal 372 KUHP (Umpama: "memiliki dengan melawan hak itu dilakukan terdakwa dengan cara bagaimana?") tersebut, sehingga keseluruhannya dapat disimpulkan merupakan perbuatan pidana penggelapan sebagaimana yang dimaksud dengan tuduhan itu.
5. Dengan demikian maka pada hakekatnya tuduhan itupun tidak memenuhi persyaratan minim yang disyaratkan oleh pasal 250 ayat 4 HIR dan oleh karenanya tuduhan inipun harus dinyatakan sebagai batal.

Ad. Tuduhan II.

Menimbang, bahwa mengenai tuduhan ini perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Walaupun tempat-tempat dan waktu-waktu perbuatan pidana telah disebutkan namun pada hakekatnya tuduhan ini juga mengandung ketidak sempurnaan sebagaimana yang disebutkan dan dipertimbangkan dalam hal tuduhan utama pengganti a di atas, sehingga oleh karenanya tuduhan itupun harus dinyatakan batal;

Ad. Tuduhan II pengganti:

Menimbang, bahwa dengan pokok-pokok pertimbangan yang sama sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan mengenai tuduhan utama pengganti b tuduhan inipun harus dinyatakan batal;

Ad. Tuduhan III.

Menimbang, bahwa mengenai tuduhan ini dengan pertimbangan-pertimbangan yang serupa sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan mengenai tuduhan Utama I, tuduhan ini harus dinyatakan batal;

Ad. Tuduhan IV:

Menimbang, bahwa mengenai tuduhan ini dengan pertimbangan-pertimbangan yang serupa sebagaimana yang dipertimbangkan mengenai tuduhan utama pengganti a harus dinyatakan batal pula;

Ad. Tuduhan IV (Pengganti).

Menimbang, bahwa mengenai tuduhan ini dengan pertimbangan yang serupa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan mengenai tuduhan utama pengganti b harus pula dinyatakan batal;

Ad. Tuduhan V:

Menimbang, bahwa mengenai tuduhan ini dengan pertimbangan-pertimbangan yang serupa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan terhadap tuduhan IV pengganti harus dinyatakan batal:

Terhadap terdakwa II Sode Ibrahim:

Menimbang, bahwa tuduhan terhadap terdakwa ini berupa:

Utama I

Pengganti

II

Pengganti

III

Ad. Tuduhan Utama I.

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang disebutkan dalam tuduhan itu adalah:

1. waktu: 21 Oktober 1963 atau pada suatu hari dalam tahun itu;
2. tempat: di gudang P.K.K. Dati II Gorontalo di Talumolo atau pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo;
3. dengan sengaja.
4. telah membuat surat palsu ataupun dipalsukan yaitu: tanda penerimaan sementara tanggal 21 Oktober 1963 No. 46.
5. dengan maksud dipergunakannya ataupun menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan.
6. perbuatan mana mengakibatkan kerugian pada P.K.K. Dati II Gorontalo sejumlah Rp. 1.683.500,—

adalah sebagai berikut:

1. waktu: tanggal 16 Oktober 1963 dan tanggal 19 Oktober 1963 dan tanggal 6 Nopember 1963 dan tanggal 11 Nopember 1963 atau pada suatu hari lain (tidak jelas istilah suatu itu, menunjuk kepada salah satu dari tanggal-tanggal tersebut atau tidak).
2. dengan sengaja.
3. telah membuat surat palsu atau yang dipalsukan.
4. tanda penerimaan sementara:
 - tanggal 16 Oktober 1963 sejumlah 1.590 lembar karung.
 - tanda penerimaan tanggal 19 Oktober 1963 sejumlah 8950 lembar karung.
 - tanda penerimaan tanggal 6 Nopember 1963 sejumlah 6.130 lembar karung.
 - tanda penerimaan tanggal 11 Nopember 1963 sejumlah 6.150 lembar karung;
5. dengan maksud dipergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakan seolah-olah tanda penerimaan sementara tersebut asli dan tidak dipalsukan.
6. sehingga oleh perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian pada P.K.K. Dati II Gorontalo sejumlah Rp. 3.383.000,-

Menimbang, bahwa lalu tuduhan itu dimaksudkan adalah perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat 1 KUHP maka masih mengandung kekurangan-kekurangan sebagai berikut:

- a. tidak disebutkan unsur bahwa surat yang dipalsukan itu dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang, atau yang dibuat untuk dipakai sebagai suatu alat bukti sesuatu perbuatan.
- b. tidak pula disebutkan unsur bahwa bilamana surat palsu itu digunakan dapat menimbulkan sesuatu kerugian.

Menimbang, bahwa dengan disebutkannya unsur tersebut nomor 6 di atas (sehingga mengakibatkan kerugian dan seterusnya) dapatlah disimpulkan bahwa surat yang dipalsukan tersebut telah digunakan sebagaimana yang diatur dalam ayat 2 pasal 263 KUHP:

Menimbang, bahwa dengan penyebutan ini berarti seluruh surat-tuduhan tersebut merupakan penggabungan dari perbuatan-perbuatan pidana yang diatur dalam ayat 1 dan ayat 2 dari pasal 263 KUHP sedang penggabungan mana masing-masing tidak lengkap penyebutan unsur-unsurnya dan juga tidak disertai penjelasan tentang perbuatan-perbuatan yang didakwakan sebagai yang nyata-nyata dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi masing-masing unsur-unsur ter-

Menimbang, bahwa selain dengan pokok-pokok pertimbangan yang diuraikan dimuka mengenai tuduhan pengganti a terhadap terdakwa I Bahruddin Kumadji, juga dipertimbangkan hal-hal: bahwa di dalam tuduhan ini tidak disebutkan unsur bahwa surat yang dipalsukan merupakan suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak ataupun suatu perikatan ataupun pembebasan dari suatu hutang ataupun yang dapat dipakai sebagai suatu tanda bukti; dan bilamana surat itu digunakan dapat menimbulkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tuduhan inipun harus dinyatakan sebagai batal;

Ad. tuduhan Utama pengganti:

Menimbang, bahwa dalam tuduhan ini dirumuskan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 waktu: tanggal 22 Oktober 1963 ataupun pada suatu hari dalam tahun itu juga.
2. tempat: di kantor P.K.K. Dati II Gorontalo atau dalam daerah Dati II Gorontalo.
3. dengan sengaja.
4. Telah memiliki dengan melawan hak uang sejumlah Rp. 1.683.500,— uang mana adalah selisih dari harga 8.950 lembar karung dalam tanda penerimaan tanggal 21 Oktober 1963 dikurangi dengan 4.140 lembar dalam tanda penerimaan tanggal 19 Oktober 1963.
5. uang mana berada dalam tangannya bukan karena kejahatan.
6. perbuatan mana mengakibatkan kerugian pada P.K.K. Dati II Gorontalo sebanyak Rp. 1.683.500,—

Menimbang, bahwa dimaksud dengan tuduhan ini adalah perbuatan ex pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal itu sudah dipenuhi namun penjelasan tentang perbuatan-perbuatan yang didakwakan sebagai nyata-nyata diperbuat oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur tersebut tidak ternyata dan dalam surat tuduhan tersebut (umpama: (1) cara dan dengan perbuatan ada unsur memiliki dengan melawan hukum itu dilakukan oleh terdakwa maupun (2) darimana dapat disimpulkan bahwa uang tersebut berada dalam tangan terdakwa bukan karena kejahatan tidak dapat diketahui, sebab kedudukan terdakwa dalam hubungannya dengan P.K.K. Dati II Gorontalo tidak jelas dalam hal ini);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka tuduhan inipun tidak memenuhi persyaratan minim sebagaimana yang diharuskan oleh pasal 250 ayat 1 H.I.R. sehingga oleh karenanya harus dinyatakan batal;

Ad. Tuduhan II:

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang disebutkan di dalam tuduhan ini

sebut umpama: "unsur telah membuat surat palsu atau yang dipalsukan", tidak jelas dengan cara bagaimana perbuatan-perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa karena kekurangan-kekurangan di dalam surat tuduhan tersebut maka dengan pertimbangan-pertimbangan yang serupa sebagai mana diuraikan di muka mengenai tuduhan pengganti a terhadap terdakwa I Bahrudin Kumadji, tuduhan inipun harus dinyatakan batal;

Ad. Tuduhan II pengganti;

Menimbang, bahwa dalam tuduhan ini disebutkan mengandung unsur-unsur:

1. waktu: tanggal 16 Oktober 1963, tanggal 19 Oktober 1963, tanggal 6 Nopember 1963, tanggal 11 Nopember 1963 ataupun pada suatu hari lain (kata suatu tidak jelas menunjuk pada tanggal yang mana).
2. tempat: di gudang P.K.K. Dati II Gorontalo di Talumolo.
3. dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hak sejumlah 1.590 + 4.130 + 6.560 lembar karung.
4. karung mana berada dalam tangan terdakwa bukan karena kejahatan.
5. sehingga oleh perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada P.K.K. Dati II Gorontalo sebanyak Rp. 3.383.000,-

Menimbang, bahwa tuduhan ini memenuhi unsur ex. pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa akan tetapi masing-masing unsurnya tidak disertai penjelasan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sebagaimana yang dituduhkan kepadanya yang dapat disimpulkan telah memenuhi maksud unsur-unsur pokok dari pasal tersebut umpama:

- a. tidak dijelaskan sengaja telah memiliki dengan melawan hak karung-karung tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan perbuatan yang berupa apa dan cara bagaimana?
- b. tidak dijelaskan bagaimana dapat disimpulkan bahwa karung-karung tersebut adalah berada dalam tangan terdakwa bukan karena kejahatan karena tidak terang kedudukan terdakwa dalam hal ini dalam hubungannya dengan P.K.K. Dati II Gorontalo.

Di samping itu unsur pokok dari pasal 372 KUHP tidak disebutkan bahwa karung-karung tersebut adalah milik orang lain dari para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka surat tuduhan inipun karena kekurangan-kekurangan tersebut harus dianggap tidak memenuhi syarat minim yang harus dipenuhi oleh setiap surat tuduhan sebagaimana diharuskan oleh pasal 250 ayat 4 H.I.R. dan oleh karenanya harus dinyatakan batal pula.

Ad. Tuduhan III:

Menimbang, bahwa dalam tuduhan ini disebutkan unsur-unsur:

1. waktu: pada tanggal dan tahun 1962 dan tahun 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam tahun 1962 dan tahun 1963.
2. Tempat: di gudang P.K.K. Dati II Gorontalo di Talumolo atau pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo.
3. dengan sengaja dan dengan maksud dengan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain selain dia.
4. dengan melawan hak telah membujuk administrateur P.K.K. Dati II Gorontalo.
5. dengan jalan memakai keadaan palsu serta perkataan-perkataan bohong dalam melaporkan karung-karung milik P.K.K. Dati II Gorontalo yang masih dalam keadaan baik sebagai karung-karung afkeur.
6. sehingga oleh perbuatannya mengakibatkan kerugian P.K.K. Dati II Gorontalo sebesar Rp. 485.000,--

Menimbang, bahwa kalau yang dimaksud dengan tuduhan ini adalah pasal 378 KUHP, maka tuduhan tersebut mengandung kekurangan unsur pokok: bahwa perbuatan membujuk dengan menggunakan kata-kata bohong tersebut ditujukan untuk: agar yang dibujuk itu memberikan sesuatu atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa tanpa penyebutan unsur-unsur tersebut berarti apa yang dilakukan oleh terdakwa dengan membujuk tersebut pada hakekatnya hanyalah merupakan:

"membuat laporan yang tidak benar karena yang baik dilaporkan sebagai afkeur";

Menimbang, bahwa di samping itu dalam surat tuduhan tersebut tidak dijelaskan perbuatan-perbuatan apa yang nyata dan didakwakan telah dilakukan terdakwa tersebut yang dapat disimpulkan telah memenuhi unsur-unsur keadaan palsu, perkataan-perkataan bohong, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa karena tidak sempurnanya tuduhan ini, maka sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan di muka, tuduhan-tuduhan tersebut harus dinyatakan batal pula;

Terhadap terdakwa III Husana Dilato::

Menimbang, bahwa tuduhan terhadap terdakwa ini terdiri dari:

- Utama I
- II dan
- II pengganti.

Ad. Tuduhan Utama I :

Menimbang, bahwa dalam tuduhan ini disebutkan unsur-unsur:

1. waktu: di antara tahun 1962 dan tahun 1963 ataupun pada suatu hari dalam tahun 1962 dan tahun 1963.
2. tempat: di gudang P.K.K. Dati II Gorontalo di Talumolo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo.
3. dengan sengaja: (unsur ini tidak diharuskan ada dalam pasal 378 KUHP).
4. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri selain dia.
5. dengan melawan hak membujuk (seharusnya unsur melawan hak adalah melekat kepada menguntungkan diri sendiri - atau orang lain tersebut).
6. dengan jalan memakai keadaan palsu serta perkataan-perkataan bohong dalam melaporkan karung-karung milik P.K.K. Dati II Gorontalo yang masih dalam keadaan baik sebagai karung-karung yang afkeur.
7. mengakibatkan kerugian pada P.K.K. Dati II Gorontalo.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang serupa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan mengenai tuduhan III terhadap terdakwa II Sode Ibrahim serta tambahan pertimbangan-pertimbangan: bahwa tidak jelas karung-karung itu berjumlah berapa sehingga merugikan sebanyak Rp. 485.000,- pada P.K.K. tersebut, maka surat tuduhan itupun harus dinyatakan batal;

Ad. Tuduhan II:

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang disebutkan dalam tuduhan ini adalah:

1. waktu: 11 Nopember 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam tahun 1963.
2. tempat: di gudang P.K.K. Dati II Gorontalo di Talumolo atau pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo.
3. dengan sengaja (unsur ini tidak diharuskan ada dalam pasal 263 ayat 1 KUHP).
4. membuat surat palsu atau yang dipalsukan tanda penerimaan tanggal 11 Nopember 1963 sejumlah 6560 lembar karung.
5. dengan maksud mempergunakannya seolah-olah tanda penerimaan tersebut asli dan tidak dipalsukan.
6. sehingga oleh perbuatan mana mengakibatkan kerugian pada P.K.K. Dati II Gorontalo sebesar Rp. 199.500,-

Menimbang, bahwa kalau yang dimaksudkan dengan tuduhan ini adalah perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 263 KUHP maka tuduhan itu

mengandung kekurangan-kekurangan penyebutan unsur-unsur:

- bahwa tanda penerimaan tersebut merupakan suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang atau yang dimaksudkan untuk membuktikan sesuatu perbuatan.
- bahwa dari penggunaan surat yang dipalsukan itu dapat menimbulkan suatu kerugian;

Menimbang, bahwa dengan disebutkannya unsur tersebut no. 6 (telah mengakibatkan kerugian sejumlah uang pada P.K.K.) maka perbuatan membuat palsu itu, surat yang dipalsukannya sudah digunakan.

Hal mana berarti menunjuk pada perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan begitu keseluruhan tuduhan II tersebut, lalu merupakan penggabungan dari perbuatan pidana dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal 263 KUHP, sedang cara perumusan dan penyusunannya masing-masing tidak lengkap:

1. baik unsur-unsur dalam delict ayat 1 maupun ayat 2 dari pasal 263 KUHP tidak lengkap.
2. perbuatan-perbuatan yang didakwakan sebagai yang nyata-nyata dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi masing-masing unsur dari masing-masing delict tersebut juga tidak sempurna: umpama dengan cara bagaimana surat palsu itu dibuat oleh terdakwa; dan tidak jelas serta tidak pasti untuk dipakai sebagai pegangan pemeriksaan maupun pembelaan diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka tuduhan II inipun tidak memenuhi keharusan minim yang harus ada sebagai yang dimaksudkan oleh ketentuan pasal 250 ayat 4 HIR, dan oleh karenanya harus dinyatakan batal pula;

Ad. Tuduhan II pengganti:

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang disebutkan dalam tuduhan ini adalah:

1. waktu: 11 Nopember 1963.
2. tempat: di gudang P.K.K. Dati II Gorontalo di Talumolo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo.
3. dengan sengaja.
4. telah memiliki dengan melawan hak.
5. sejumlah 6560 lembar karung yang tercantum dalam tanda penerimaan tanggal 11 Nopember 1963:
6. karung mana adalah milik P.K.K. Dati II Gorontalo.
7. karung mana berada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

8 sehingga oleh perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian pada P.K.K. Dati II Gorontalo sebanyak Rp. 2.296.000,-

Menimbang, bahwa tuduhan ini mengandung kekurangan-kekurangan penjelasan tentang perbuatan-perbuatan yang nyata-nyata dilakukan oleh terdakwa yang dapat disimpulkan telah memenuhi unsur-unsur;

1. memiliki dengan melawan hak karung-karung tersebut dengan dilakukan dengan cara dan dalam bentuk perbuatan apa?
2. bahwa karung-karung tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan itu dapat disimpulkan dari keadaan, perbuatan atau kedudukan terdakwa yang bagaimana.

Menimbang, bahwa juga tuduhan ini dengan begitu kabur dan tidak sempurna memenuhi syarat minim dari pasal 250 ayat 4 H.I.R. oleh karenanya harus dinyatakan batal;

Terhadap terdakwa IV Moki Djaafar:

Menimbang, bahwa tuduhan terhadap terdakwa ini berupa:

- Utama I
- Pengganti.
- II
- III

Ad. Tuduhan Utama I:

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang dirumuskan dalam tuduhan ini adalah sebagai berikut:

1. waktu: tanggal 21 Oktober 1963 ataupun pada suatu hari dalam tahun itu.
2. tempat: di gudang P.K.K. Dati II Gorontalo di Talumolo atau pada suatu tempat lain di daerah Gorontalo.
3. dengan sengaja: (unsur ini tidak diharuskan ada menurut perbuatan pidana ex pasal 263 ayat 1 KUHP tetapi unsur sengaja harus ada dalam perbuatan pidana ex pasal 263 ayat 2 KUHP dengan bentuk dengan sengaja menggunakan surat palsu).
4. telah membuat surat palsu ataupun yang dipalsukan.
5. tanda penerimaan tanggal 21 Oktober 1963.
6. dengan maksud dipergunakannya ataupun menyuruh orang lain - mempergunakannya seolah-olah tanda penerimaan tersebut asli dan tidak dipalsukan.

7. sehingga oleh perbuatan terdakwa mana mengakibatkan kerugian pada P.K.K. Dati II Gorontalo sejumlah Rp. 1.683.500,—

Menimbang, bahwa mengingat disebutkan unsur sengaja tersebut dan unsur terakhir no. 7 di atas dapat menimbulkan kesan bahwa tuduhan ini dalam keseluruhannya merupakan penggabungan dari perbuatan-perbuatan pidana ex pasal 263 ayat 1 dan pasal 263 ayat 2 KUHP, yang masing-masing merupakan perbuatan pidana sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa akan tetapi penggabungan tersebut mengandung kekurangan-kekurangan unsur-unsur:

1. dari pasal 263 ayat 1 KUHP sebagai berikut:
 - a. bahwa tanda penerimaan yang dipalsukan itu dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang atau yang dibuat untuk membuktikan sesuatu perbuatan.
 - b. bahwa dari penggunaan surat yang dipalsukan itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian.
2. dari pasal 263 ayat 2 KUHP:
menggunakan surat palsu atau yang dipergunakan sebagai asli atau yang tidak dipalsukan.

Menimbang, bahwa di samping itu dengan cara penggabungan tersebut dalam keseluruhannya tuduhan itu lalu tidak merupakan perbuatan-perbuatan pidana yang lengkap:

1. baik unsur-unsur dari delict ayat 1 maupun ayat 2 dari pasal 263 KUHP, tidak lengkap.
 2. perbuatan-perbuatan yang didakwakan sebagai yang nyata-nyata telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi masing-masing unsur dari masing-masing delictpun juga tidak lengkap umpama dengan cara bagaimana surat palsu itu dibuat oleh terdakwa.
- b. menggunakan dengan sengaja surat palsu sebagai asli dan tidak dipalsukan itu dapat disimpulkan dari perbuatan-perbuatan terdakwa yang bagaimana?

Menimbang, bahwa dengan demikian tuduhan inipun tidak sempurna dan harus pula dinyatakan batal;

Ad. Tuduhan utama I pengganti:

Menimbang, bahwa dalam tuduhan ini unsur-unsur yang disebutkan adalah sebagai berikut:

1. waktu: tanggal 21 Oktober ataupun pada suatu hari dalam tahun itu.
2. tempat: di gudang P.K.K. Dati II Gorontalo di Talumolo atau pada suatu tempat lain di daerah Gorontalo.
3. dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hak.
4. uang sebesar Rp. 1.683.500,—
5. uang mana adalah milik P.K.K. Dati II Gorontalo ataupun milik badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.
6. sehingga oleh perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian pada P.K.K. Dati II Gorontalo sebesar Rp. 1.683.500,—

Menimbang, bahwa susunan surat tuduhan ini kabur sama sekali; ex pasal 372 KUHP maupun perbuatan pidana korupsi dalam Lembaran Negara No. 72 tahun 1960 pun tidak;

Menimbang, bahwa dilihat dari pasal 372 KUHP mengandung kekurangan dengan tidak disebutkannya unsur "bahwa barang yang telah dimilikinya dengan melawan hak" yang berupa wang tersebut berada dalam tangannya bukan berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sedang dilihat dari pasal 1 Lembaran Negara No: 72 tahun 1960 tidak jelas perbuatan pidana yang dimaksud itu yang mana, apakah pasal 1 sub a ataukah pasal 1 sub b ataupun pasal 1 sub c, karena masing-masing perbuatan pidana tersebut berdiri sendiri dan masing-masing termasuk dalam golongan perbuatan pidana yang besar yaitu tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa di samping itu pada masing-masing unsurpun tidak dijelaskan perbuatan-perbuatan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa yang dapat disimpulkan telah memenuhi masing-masing unsur dari perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya;

Umpama: tidak jelas dari mana dapat disimpulkan, bahwa terdakwa telah memiliki dengan melawan hak uang sebesar Rp. 1.683.500,—

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka tuduhan ini tidak juga memenuhi persyaratan minim yang diharuskan oleh ketentuan pasal 250 ayat 4 H.I.R., sehingga oleh karenanya harus dinyatakan batal;

Ad. Tuduhan II:

Menimbang; bahwa tuduhan ini dirumuskan dengan unsur-unsur yang sama dengan tuduhan bab II terhadap terdakwa II Sode Ibrahim;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan dasar pertimbangan yang sama tuduhan ini harus dinyatakan batal;

Ad. Tuduhan III:

Menimbang bahwa unsur-unsur perbuatan pidana yang dirumuskan dalam

tuduhan ini adalah sama dengan apa yang dirumuskan dalam tuduhan bab III terhadap terdakwa II Sode Ibrahim;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan dasar-dasar pertimbangan yang sama sebagaimana diuraikan mengenai tuduhan tersebut, tuduhan inipun harus dinyatakan batal;

Terhadap terdakwa V Soleman Dengo:

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa ini dituduhkan berturut-turut:

Utama I

II

Ad. Tuduhan Utama I:

Menimbang, bahwa unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam tuduhan ini adalah sebagai berikut:

1. waktu : dalam tahun 1962 dan tahun 1963.
2. tempat : di kantor P.K.K. Dati II Gorontalo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo.
3. dengan sengaja serta dengan bersekongkol dengan terdakwa lainnya.
4. dengan maksud mendapat untung.
5. telah membeli atau menyimpan serta menyembunyikan karung-karung milik P.K.K. Dati II Gorontalo.
6. dengan maksud untuk mendapatkan untung.
7. sedang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa karung-karung tersebut diperolehnya dengan jalan kejahatan.
8. dimana oleh perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian pada P.P.K. Dati II Gorontalo sebanyak Rp. 469.625.

Menimbang, bahwa walaupun dapat dimengerti bahwa tuduhan dimaksudkan adalah perbuatan pidana ex pasal 480 ayat 1 KUHP, tetapi dalam tuduhan tersebut tidak disertai penjelasan tentang perbuatan-perbuatan yang nyata telah dilakukan oleh terdakwa sebagai yang dituduhkan kepadanya yang dapat disimpulkan memenuhi unsur-unsur tersebut;

Umpama : — dengan cara bagaimana ia membeli, menyimpan atau menyembunyikan karung-karung tersebut.

- berapa jumlah karung yang ia beli, atau simpan atau sembunyikan sehingga dapat diperhitungkan seharga Rp. 469.625,—
- bagaimana dapat disimpulkan bahwa karung-karung itu seharusnya patut diketahui atau disangka oleh terdakwa bahwa berasal dari kejahatan karena kejahatannya sendiri sebagai pokok pangkal asal karung-karung itu tidak dijelaskan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mana surat-tuduhan inipun tidak memenuhi apa yang secara minim diharuskan ada oleh ketentuan pasal

250 ayat 4 H.I.R. dan oleh karena itu harus dinyatakan batal pula;

Ad. Tuduhan II:

Menimbang, bahwa unsur perbuatan pidana yang dirumuskan dalam tuduhan ini adalah sebagai berikut:

1. waktu : tanggal 22 Oktober 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam tahun itu juga.
2. tempat: kantor P.K.K. Dati II Gorontalo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo.
3. dengan sengaja (unsur ini sebenarnya tidak diharuskan ada menurut pasal 263 ayat 1 KUHP).
4. telah membuat surat palsu atau yang dipalsukan.
5. yakni kwitansi tanggal 22 Oktober sebesar Rp. 3.156.200,--, uang mana adalah harga 8950 lembar karung dalam tanda penerimaan tanggal 21 Oktober 1963.
6. sedangkan terdakwa mengetahui atau patut dapat disangkanya bahwa jumlah karung tersebut sebenarnya tidak ada.
7. sedangkan kwitansi mana dipergunakannya ataupun menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah kwitansi tersebut asli dan tidak dipalsukan sehingga oleh perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa kalau yang dimaksudkan tuduhan ini adalah perbuatan pidana dalam pasal 263 ayat 1 KUHP maka rumusan tersebut mengandung kekurangan-kekurangan unsur-unsur:

- bahwa kwitansi yang dipalsukan itu dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang atau dimaksudkan untuk membuktikan sesuatu perbuatan.
- bahwa dari penggunaan surat yang dipalsukan tersebut dapat menimbulkan sesuatu kerugian.

Menimbang, bahwa di samping itu dalam tuduhan ini juga tidak disertai penjelasan tentang perbuatan-perbuatan yang nyata-nyata telah dilakukan oleh terdakwa sebagai yang dituduhkan kepadanya yang dapat disimpulkan telah memenuhi masing-masing unsur-unsur dari delict tersebut umpama:

1. dari mana dapat disimpulkan bahwa perbuatan kwitansi palsu itu merugikan P.K.K. Dati II Gorontalo sebesar jumlah tersebut.
 2. dengan perbuatan-perbuatan apa saja terdakwa membuat kwitansi palsu tersebut.
 3. bagaimana jelasnya hubungan kwitansi tanggal 22 Oktober 1963 tersebut dengan kata-kata uang mana adalah harga 8950 lembar karung dalam tanda penerimaan tanggal 21 Oktober 1963.
- apakah dalam hal ini dibuat double kwitansi ataukah sebagian dari jumlah

yang tersebut dalam kwitansi tanggal 21 Oktober 1963 dibuat lagi tanggal 22 Oktober 1963.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka surat-tuduhan inipun harus dianggap tidak sempurna memenuhi persyaratan minim yang diharuskan oleh pasal 250 ayat 4 H.I.R. dan oleh karenanya haruslah juga dinyatakan batal;

Terhadap terdakwa VI Edy Karim:

Menimbang, bahwa tuduhan terhadap terdakwa ini adalah perbuatan pidana penggelapan ex pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dalam tuduhan inipun tidak disertai penjelasan-penjelasan yang pokok tentang terdakwa yang nyata-nyata telah dilakukannya yang dituduhkan kepadanya dan yang dapat disimpulkan memenuhi unsur-unsur dari delict tersebut, umpama:

1. dengan cara bagaimanakah terdakwa telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sejumlah 470 + 720 lembar karung tersebut.
2. dari manakah dapat disimpulkan bahwa karung-karung tersebut berada dalam tangan terdakwa bukan karena kejahatan, karena tidak dijelaskan selain hubungan antara terdakwa dengan P.K.K. Dati II Gorontalo juga tidak jelas cara-cara asal mulanya ia menguasai karung-karung tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tuduhan inipun tidak sempurna dan tidak memenuhi persyaratan minim yang harus ada sebagaimana yang diharuskan oleh pasal 250 ayat 4 H.I.R. oleh karenanya tuduhan tersebut harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa kini ternyata dari pertimbangan-pertimbangan di muka, bahwa seluruh tuduhan yang dilimpahkan pada para terdakwa tersebut harus dinyatakan batal, dan oleh karenanya juga berita acara pemeriksaannya di muka persidangan yang dilakukan berdasar tuduhan-tuduhan tersebut harus pula dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut di atas harus dibatalkan seluruhnya dan Pengadilan Tinggi akan mengambil putusan sendiri sebagaimana diuraikan di bawah:

Mengingat aturan Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Gerson Bawuohm Jaksa pada Kejaksaan Negeri Gorontalo tersebut;

Membatalkan seluruh putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 7 Juli 1965 No. 1/1965 H.N. Pid. tersebut;

Mengadili sendiri:

1. Membatalkan seluruh tuduhan yang dilimpahkan kepada para terdakwa dalam perkara ini yaitu terhadap terdakwa I bernama:
 - a. Bahruddin Kumadji, tuduhan: Utama I, pengganti a, pengganti B, II

- pengganti III, IV, pengganti V tersebut;
- b. terdakwa II Sode Ibrahim, tuduhan-tuduhan Utama I, pengganti II, pengganti III tersebut;
- c. terdakwa III Husana Dilato, tuduhan: Utama I, II dan II pengganti, tersebut;
- d. terdakwa IV Moki Djaafar, tuduhan: utama I, pengganti II, III tersebut;
- e. terdakwa V Soleman Dengo, tuduhan: utama I, II tersebut;

2. Membatalkan seluruh berita acara pemeriksaan Pengadilan Negeri Gorontalo di dalam perkara para terdakwa tersebut;

3. Menetapkan biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding akan dipikul oleh Negara;

Demikianlah diambil keputusan pada hari Kamis, tanggal dua Nopember 1900 enam puluh tujuh, oleh kami Indroharto SH. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, dengan dihadiri oleh Fhakh Suhah, Panitera-Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut.

Panitera-Pengganti,
t.t.d.
(FHAKIH SUAH).

Ketua,
t.t.d.
(INDROHARTO S.H.).

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GORONTALO No. 1/1965 HN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:

Pengadilan Negeri di Gorontalo, duduk bersidang di Gorontalo, Propinsi Sulawesi Utara, telah menjatuhkan keputusan tertera sebagai berikut dalam perkara dari terdakwa-terdakwa:

- I. Bahruddin Kumadji, umur 37 tahun, lahir di kg. Limba B tinggal dikg. Talumolo Kotapraja Gorontalo, pekerjaan Pegawai Pusat Koperasi Kopra Dati II Gorontalo, berada dalam tahanan sejak tgl. 2 Juli 1964 s/d tgl. 22 Januari 1965, kini berada di luar tahanan;
- II. Sode Ibrahim, umur 43 tahun, lahir dikg. Ipilo, tinggal dikg. Tamalate Kotapraja Gorontalo, pekerjaan Pegawai pusat Koperasi Kopra Dati II Gorontalo, berada dalam tahanan sejak tgl. 1 Juli 1964 s/d tgl. 22 Januari 1965, kini berada di luar tahanan;
- III. Husana Dilato, umur 63 tahun, lahir dikg. Mongolato Telaga, Dati II, Gorontalo, tinggal dikg. Limba U Kotapraja Gorontalo, pekerjaan Pegawai Pusat Koperasi Kopra Gorontalo, berada dalam tahanan sejak tgl. 1 Juli 1964 s/d tgl. 22 Januari 1965, kini berada di luar tahanan;
- IV. Moki Djaafar, umur 50 tahun, lahir dikg. Bongo, tinggal dikg. Tenda Kotapraja Gorontalo, pekerjaan Pegawai Pusat Koperasi Kopra Dati II Gorontalo, berada dalam tahanan sejak tgl. 1 Juli 1964 s/d tgl. 22 Januari 1965, kini berada di luar tahanan;
- V. Soleman Dengo, umur 37 tahun, lahir dikg. Limba B, tinggal dikg.

Blawao Kotapraja Gorontalo, pekerjaan berdagang karong, berada dalam tahanan sejak tgl. 29 Juni 1964 s/d tgl. 24 Januari 1965, kini berada di luar tahanan;

VI. Edy Karim, umur 37 tahun, lahir dan tinggal dikg. Lekobalo, Kotapraja Gorontalo, pekerjaan berdagang karong, berada dalam tahanan sejak tgl. 6 Juli 1964 s/d tgl. 29 Januari 1965, kini berada di luar tahanan;

Para terdakwa kesemuanya dihadapkan sidang dibela oleh sdr. Abdurrachman Daeng Sisila;

Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut;

Memperhatikan serta membaca surat pemeriksaan pendahuluan di dalam perkara ini;

Mendengar pembacaan surat tuduhan tertanggal 27 Maret 1965;

Mendengar pembelaan para terdakwa dan keterangan saksi-saksi;

Mendengar lagi tuntutan Jaksa sebagai penuntut umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Negeri Gorontalo menyatakan kepada para terdakwa salah terhadap tuduhan-tuduhan yang untuk singkatnya sebagaimana tertera dalam requestoirnya dan akan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa-terdakwa, yaitu terdakwa I. 5 tahun penjara potong tahanan, terdakwa II 1 tahun 6 bulan potong tahanan, terdakwa III. 1 tahun potong tahanan, terdakwa IV. 8 bulan potong tahanan, terdakwa V. 2 tahun potong tahanan, terdakwa VI. 8 bulan potong tahanan, bukti sejumlah 7030 lembar karung dirampas menjadi milik Negara, sedangkan buku-buku serta bundelan surat-suratan dikembalikan kepada Pusat Koperasi Kopra Dati II, Gorontalo;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa menurut surat tuduhan dituduhkan sebagai berikut:

Terhadap terdakwa I. Bahrudin Kunudji:

Utama I.

bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya pada atau kira-kira tanggal 22 Oktober 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam tahun itu juga, di kantor P.K.K. Dati II Gorontalo, ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo, dengan sengaja, serta dengan maksud memperkaya dirinya sendiri atau orang lain selain dia, telah mengambil uang sejumlah Rp. 1.683.500,— uang mana milik P.K.K. Dati II Gorontalo, ataupun milik suatu badan Hukum lain yang mempergunakan modal itu dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat, dengan jalan menyalah-gunakan jabatannya serta kedudukannya, sehingga oleh perbuatan mana, mengakibatkan kerugian bagi PKK Dati II Gorontalo, ataupun merugikan perekonomian Negara atau daerah atau badan lain yang menerima bantuan dari masyarakat tersebut sebanyak Rp. 1.683.500,— ataupun lebih dari Rp. 250.—

Pengganti a:

Bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya, pada tanggal 22 Oktober 1963 dan tanggal 21

Oktober 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam tahun itu juga, di kantor P.K.K. Dati II Gorontalo, ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo, dengan sengaja dan dengan direncanakan telah membuat surat palsu atau yang dipalsukan yakni kwitansi tt. 22 Oktober 1963 sejumlah uang Rp. 3.156.200,- dan tanda penerimaan ttg. 21 Oktober 1963 No. 46 dengan maksud dipergunakannya ataupun menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah kwitansi tersebut asli dan tidak dipalsukan, sehingga oleh perbuatan mana menimbulkan kerugian terhadap P.K.K. Dati II Gorontalo sebanyak Rp. 1.683.500,- ataupun lebih dari Rp. 250,-

PENGGANTI B:

Bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya, pada tanggal, bulan tahun, seperti pada tuduhan UTAMA I di atas, di kantor P.K.K. Dati II Gorontalo, ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo, dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hak uang sejumlah Rp. 1.683.500,- uang mana milik P.K.K. Dati II Gorontalo ataupun milik orang lain selain dia, sedangkan uang mana berada dalam tangannya bukan karena kejahatan sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut merugikan kepada P.K.K. Dati II Gorontalo, sebanyak Rp. 1.683.500,- atau lebih dari Rp. 250,-

..... II ..

Bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama dengan terdakwa-terdakwa lainnya, pada tanggal 16 Oktober 1963, berikut pada tanggal 19 Oktober 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam tahun itu juga, di kantor P.K.K. Dati II Gorontalo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo, dengan sengaja ataupun direncanakan lebih dahulu, telah membuat atau menyuruh membuat surat palsu atau yang dipalsukan yaitu tanda-tanda penerimaan yaitu tanda penerimaan sementara tt. 16 Oktober 1963 sejumlah 1590 lembar karong dan tanda penerimaan sementara tt. 19 Oktober 1963 sejumlah 4140 lembar karong, dengan maksud dipergunakannya ataupun menyuruh orang lain mempergunakannya, seolah-olah tanda penerimaan tersebut asli dan tidak dipalsukan sehingga oleh perbuatannya menimbulkan kerugian bagi P.K.K. Dati II Gorontalo sebanyak Rp. 500.000,- + Rp. 1.683.500,- = Rp. 2.183.500,- ataupun lebih dari Rp. 250,-

PENGGANTI:

Bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya pada tanggal 17 Oktober 1963 berikut pada tanggal 22 Oktober 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam tahun itu juga, di kantor P.K.K. Dati II Gorontalo, ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hak uang sejumlah Rp. 2.183.500,-, uang mana adalah milik P.K.K. Dati II Gorontalo ataupun milik orang lain selain P.K.K. Dati II Gorontalo sedangkan uang mana beradalah dalam tangannya bukan karena

kejahatan, sehingga oleh perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian kepada P.K.K. Dati II Gorontalo sebanyak Rp. 2.183.500,— ataupun lebih dari Rp. 250,—

III.

Bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya pada tanggal 17 Oktober 1963, tanda penerimaan sementara tt. 16 Oktober 1963, no. 44, berikut pada tanggal 22 Oktober 1963, tanda penerimaan tt. 21 Oktober 1963 no. 46, ataupun pada suatu hari lain dalam tahun itu juga, di kantor PKK Dati II Gorontalo, serta dengan maksud memperkaya sendiri ataupun orang lain selain dia, telah mengambil uang sejumlah Rp. 2.183.500,— uang mana milik PKK Dati II Gorontalo ataupun milik suatu badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat dengan jalan menyalah-gunakan jabatannya serta kedudukannya, sehingga oleh perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian kepada Dati II Gorontalo ataupun merugikan perekonomian Negara ataupun daerah atau badan lain yang menerima bantuan dari keuangan negara ataupun badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat tersebut sebanyak Rp. 2.183.500,— ataupun lebih dari Rp. 250,—

IV.

bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya, pada tanggal 14 Oktober 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam tahun itu juga, di kantor PKK Dati II Gorontalo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo, dengan sengaja membuat surat palsu atau yang dipalsukan, yakni faktur no. 216/2 tt. 14 Oktober 1963 sejumlah 1385 lembar karong atas nama lelaki Tony Ginsu atau orang lain selain dia, dengan maksud dipergunakannya ataupun menyuruh orang lain mempergunakannya seolah olah faktur tersebut asli dan tidak dipalsukan, sehingga oleh perbuatannya mengakibatkan kerugian kepada P.K.K. Dati II Gorontalo sebanyak Rp. 304.700,— ataupun lebih dari Rp. 250,—

PENGGANTI

bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya, pada tanggal 14 Oktober 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam tahun itu juga, di kantor PKK Dati II Gorontalo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hak uang sejumlah Rp. 304.700,— uang mana adalah milik PKK Dati II Gorontalo ataupun milik orang lain selain dari PKK Dati II Gorontalo, sedangkan uang mana berada dalam tangannya bukan karena kejahatan, sehingga oleh perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian kepada PKK Dati II Gorontalo sebanyak Rp. 304.700,— ataupun lebih dari Rp. 250,—

V.

bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya, pada tanggal 17 Mei 1962 berikut pada tanggal 29

April 1963, ataupun pada suatu hari lain dalam tahun 1962 dan tahun 1963, di kantor PKK Dati II Gorontalo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo, dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hak uang sejumlah Rp. 69.500,— uang mana adalah harga 470 lembar karong dan 720 lembar karong milik PKK Dati II Gorontalo yang dijual oleh terdakwa tersebut kepada lelaki Edy Karim ataupun orang lain selain dia, sedangkan uang mana berada dalam tangannya terdakwa bukan karena kejahatan, sehingga oleh perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian kepada PKK Dati II Gorontalo sejumlah Rp. 69.500,— ataupun lebih dari Rp. 250,—

**Terhadap terdakwa II. Sode Ibrahim:
Utama I.**

bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya, pada tanggal 21 Oktober 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam tahun itu juga, di gudang PKK Dati II Gorontalo di Talumolo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo, dengan sengaja telah membuat surat palsu ataupun dipalsukan, yakni tanda penerimaan sementara tt. 21 Oktober 1963, no. 46 dengan maksud dipergunakannya ataupun menyuruh orang lain mempergunakannya, seolah-olah tanda penerimaan tersebut asli dan tidak dipalsukan, sehingga oleh perbuatan mana telah mengakibatkan kerugian kepada PKK Dati II Gorontalo sejumlah Rp. 1.683.500,— atau lebih dari Rp. 250,—

Pengganti :

bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya pada tanggal 22 Oktober 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam tahun itu juga, di kantor PKK Dati II Gorontalo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hak uang sejumlah Rp. 1.683.500,— uang mana adalah selisih harga dari 8950 lembar karong dalam tanda penerimaan tt. 22 Oktober 1963 dikurangi dengan 4140 lembar dalam tanda penerimaan sementara tt. 19 Oktober 1963, sedang uang mana pula berada dalam tangannya terdakwa bukan karena kejahatan, sehingga oleh perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian kepada P.K.K. Dati II Gorontalo sebanyak Rp. 1.683.500,— ataupun lebih dari Rp. 250.—

- II. Bahwa ia terdakwa sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa lainnya di gudang P.K.K. Dati II Gorontalo di Talumolo, ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo, pada tanggal 16 Oktober 1963, berikut pada tanggal 19 Oktober 1963 berikut pada tanggal 6 Nopember 1963, berikut pada tanggal 11 Nopember 1963 ataupun

pada suatu hari lain dalam tahun 1963 dengan sengaja telah membuat surat palsu atau yang dipalsukan yakni tanda penerimaan-penerimaan sementara tt. 16 Oktober 1963, sejumlah 1590 lembar karong, berikut tanda penerimaan sementara tt. 19 Oktober 1963 sejumlah 8950 lembar karong berikut tanda penerimaan sementara tt. 6 Nopember 1963 sejumlah 4130 lembar berikut tanda penerimaan sementara tt. 11 Nopember 1963 sejumlah 6560 lembar karong dengan maksud dipergunakannya ataupun menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah tanda penerimaan-penerimaan sementara tersebut asli dan tidak dipalsukan, sehingga oleh perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian kepada P.K.K. Dati II Gorontalo sejumlah Rp.3.383.000.— ataupun lebih dari Rp.250.—

PENGGANTI :

bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya di gudang P.K.K. Dati II Gorontalo di Talumolo pada tanggal 16 Oktober 1963 berikut pada tanggal 19 Oktober 1963 berikut pada tanggal 6 Nopember 1963, berikut pada tanggal 11 Nopember 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam tahun 1963 dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hak sejumlah 1590 + 4140 + 4130 + 6560 lembar karong mana berada dalam tangannya terdakwa bukan karena kejahatan, sehingga oleh perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian kepada P.K.K. Dati II Gorontalo sebanyak Rp.3.383.000.— ataupun lebih dari Rp.250.—

- III. bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa lainnya di gudang PKK Dati II Gorontalo di Talumolo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo, pada tanggal dan tahun 1962 serta tahun 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam tahun 1962 dan tahun 1963, dengan sengaja dan dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain selain dia, dengan melawan hak telah membujuk Administrateur PKK Dati II Gorontalo dengan jalan memakai keadaan palsu serta perkataan-perkataan bohong dalam melapurkan karung-karung milik PKK Dati II Gorontalo yang masih dalam keadaan baik sebagai karung-karung afkeur, sehingga oleh perbuatannya terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian kepada PKK Dati II Gorontalo sebesar Rp.485.000.— ataupun lebih dari Rp.250.—

Terhadap Terdakwa III. Husana Dilato.

Utama I :

bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa lainnya digudang PKK Dati II Gorontalo di Talumolo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo diantara tahun 1962 dan tahun

1963 ataupun pada suatu hari lain dalam peredaran tahun 1962 dan tahun 1963 dengan sengaja dan dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain selain dia, dengan melawan hak telah membujuk administrateur PKK Dati II Gorontalo dengan jalan memakai keadaan palsu serta perkataan-perkataan bohong dalam melapurkan karung-karung milik PKK Dati II Gorontalo yang masih dalam keadaan baik sebagai karung-karung yang alkeur, sehingga oleh perbuatannya mengakibatkan kerugian kepada PKK Dati II Gorontalo sebanyak Rp. 485.000.- ataupun lebih Rp. 250.-

II bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya pada tanggal 11 Nopember 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam tahun 1963 di gudang P.K.K. Dati II Gorontalo di Talumolo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo, dengan sengaja telah membuat surat palsu atau yang dipalsukan yakni tanda penerimaan sementara tanggal 11 Nopember 1963 sejumlah 6560 lembar karong dengan maksud mempergunakannya seolah-olah tanda penerimaan sementara tersebut asli dan tidak dipalsukan, sehingga perbuatannya terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian kepada PKK Dati II Gorontalo sejumlah Rp. 199.500.-.

Pengganti :

bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya pada tanggal 11 Nopember 1963; di gudang PKK Dati II Gorontalo di Talumolo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hak sejumlah 6560 lembar karong yang tercantum dalam tanda penerimaan sementara tertanggal 11 Nopember 1963, karong mana adalah milik PKK Dati II Gorontalo yang dibeli dari Soleman Dango atau orang lain selain dia, sedang karong mana berada dalam tangannya bukan karena kejahatan, sehingga oleh perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian kepada PKK. Dati II Gorontalo sebanyak 6560 kali a Rp. 350.- per lembar = Rp. 2.296.000.- ataupun lebih dari Rp. 250.-

Terhadap Terdakwa IV. Moki Djaafar :

Utama I :

bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya, pada tanggal 21 Oktober 1963 ataupun pada suatu hari dalam tahun itu juga, di gudang PKK Dati II Gorontalo di Talumolo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo, dengan sengaja telah membuat surat palsu ataupun yang dipalsukan yakni tanda penerimaan tertanggal 21 Oktober 1963 No. 46, dengan maksud dipergunakannya ataupun menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah tanda penerimaan tersebut asli dan tidak dipalsukan

sehingga oleh perbuatan terdakwa mana mengakibatkan kerugian kepada PKK Dati II Gorontalo sejumlah Rp. 1.683.500.— ataupun lebih dari Rp. 250.—

Pengganti :

bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya pada tanggal 21 Oktober 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam tahun 1963 di gudang PKK Dati II Gorontalo di Talumolo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hak uang sebesar Rp. 1.683.500.— sebagaimana yang tercantum dalam tanda penerimaan sementara tertanggal 21 Oktober 1963 No. 46, uang mana adalah milik PKK Dati II Gorontalo ataupun milik badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat, sehingga oleh perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian kepada PKK Dati II Gorontalo sebesar Rp. 1.683.500.— atau lebih dari Rp. 250.—

II. bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya, pada tanggal 16 Oktober 1963 berikut pada tanggal 19 Oktober 1963 berikut pada tanggal 6 Nopember 1963 dan berikut pada tanggal 11 Nopember 1963 di gudang PKK Dati II Gorontalo di Talumolo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo dengan sengaja telah membuat surat palsu atau yang dipalsukan yakni tanda penerimaan sementara masing-masing tertanggal 16 Oktober 1963 sejumlah 1590 lembar karong, tertanggal 19 Oktober 1963 sejumlah 1590 lembar karong, tertanggal 6 Nopember 1963 sejumlah 4130 lembar karong, tertanggal 11 Nopember 1963 sejumlah 6560 lembar karong dengan maksud dipergunakannya ataupun menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah tanda penerimaan-penerimaan tersebut asli dan tidak dipalsukan, sehingga oleh perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian kepada PKK Dati II Gorontalo sejumlah Rp. 3.383.000 atau lebih dari Rp. 250.—

III. bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya, pada peredaran tahun 1962 dan tahun 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam tahun-tahun tersebut di gudang PKK Dati II Gorontalo di Talumolo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo, dengan sengaja dan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain selain dari dia, dengan melawan hak telah membujuk administrateur PKK Dati II Gorontalo dengan jalan memakai keadaan palsu serta dengan perkataan-perkataan bohong dalam melaporkan karung milik PKK Dati II Gorontalo yang masih dalam keadaan baik sebagai karung-karung yang askeur, sehingga oleh perbuatannya terdakwa mengakibatkan kerugian kepada PKK Dati II Gorontalo sebanyak Rp. 485.000 ataupun lebih dari Rp. 250.—

Terhadap terdakwa V. Soleman Dengo :

Utama I :

bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya pada peredaran tahun 1962 dan tahun 1963 ataupun pada suatu hari dalam tahun-tahun tersebut di kantor P.K.K. Dati II Gorontalo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo, dengan sengaja serta dengan bersekongkol dengan terdakwa-terdakwa lainnya telah membeli atau menyimpan serta menyembunyikan karong-karong milik P.K.K. Dati II Gorontalo dengan maksud mendapatkan untung, sedang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa karong-karong tersebut diperolehnya dengan jalan kejahatan, dimana oleh perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian kepada P.K.K. Dati II Gorontalo, sebanyak Rp. 469.625.-- atau lebih dari Rp. 250.--

II.

Bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya pada tanggal 22 Oktober 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam tahun itu juga di kantor P.K.K. Dati II Gorontalo ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo, dengan sengaja telah membuat surat palsu atau yang dipalsukan yakni kwitansi tt. 22 Oktober 1963 sejumlah Rp. 3.156.200.-- uang mana adalah harga 8950 lembar karong dalam tanda penerimaan tt. 21 Oktober 1963 sedangkan terdakwa mengetahui atau patut dapat disangkanya bahwa jumlah karong 8950 lembar tersebut sebenarnya tidak ada, sedangkan kwitansi mana dipergunakannya ataupun penyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah kwitansi tersebut asli dan tidak dipalsukan sehingga pula oleh perbuatannya terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi P.K.K. Dati II Gorontalo sebanyak Rp. 1.683.500.-- atau lebih dari Rp. 250.--

Terhadap terdakwa VI: EDY KARIM ;

bahwa ia terdakwa sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya pada tanggal 17 Mei 1962 berikuit pada tanggal 29 April 1963 ataupun pada suatu hari lain dalam peredaran tahun 1962 dan tahun 1963 di gedung P.K.K. Dati II Gorontalo di Kwandang ataupun pada suatu tempat lain dalam daerah Gorontalo dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hak sejumlah 470 + 720 lembar karong, karong mana adalah milik P.K.K. Dati II Gorontalo yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan sehingga oleh perbuatannya terdakwa mengakibatkan kerugian kepada P.K.K. Dati II Gorontalo sebesar Rp. 89.250.-- ataupun lebih dari Rp. 250.--

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan bersedia pemeriksaan perkara mereka akan diperiksa;

Menimbang, bahwa para terdakwa setelah ditanya, menegaskan, bahwa mereka kesemuanya menyangkal tuduhan-tuduhan yang dibebankan kepada mereka, dan begitu pula tidak membenarkan terhadap keterangan-keterangan yang mereka telah berikan di muka pemeriksaan, pendahuluan, berhubung dengan kejamnya pemeriksaan, sehingga mengakibatkan rasa takut dan tidak bebas untuk memberikan keterangan ataupun pembelaannya di hadapan pemeriksa;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas, kami berpendapat tidak begitu penting diperhatikan, karena amat mustahillah seorang yang merasa pernah melakukan sesuatu kejahatan, mengaku bersalah hanya dengan alasan-alasan sebagaimana telah dipaparkan tadi;

Menimbang, bahwa kami setelah melihat dan memperhatikan dari segi lain yakni terhadap penyangkal para terdakwa serta pembelaan-pembelaan mereka di hadapan persidangan, maka sesuai dengan peraturan hukum kesemuanya itu wajib pula disertakan dengan pembuktian-pembuktian yang nyata dan cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kami selama pemeriksaan ini berlangsung, melakukan pemeriksaan sendiri (zelfstandig) serta mengadakan penyelidikan terhadap bukti dalam perkara ini, demikian pula memperhatikan dengan seksama hal-hal baik dimajukan oleh terdakwa-terdakwa maupun pembelanya dan keterangan saksi-saksi, dengan menyampingkan hal-hal yang tidak patut diladeni atau semata-mata tak ada sangkut pautnya dengan perkara tuduhan ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Usman Kamba sebagai Pelapur, menerangkan atas sumpah di muka sidang, bahwa ia saksi mendengar ceritera dari Da I Mooduto sebagai Anggota Dewan Pemeriksa P.K.K. Dati II Gorontalo, pernah diketemui sebuah kwitansi mengenai penerimaan uang harga karong sedangkan penerima uang tersebut bukan seorang pedagang;

bahwa menurut saksi sebanyak karung lebih 7100 lembar karong milik PKK disinyalir telah diselewengkan dan ini bukan lagi rahasia umum, dan ia saksi sebagai seorang petani kelapa merasa dirugikan atas penyelewengan karong-karong tersebut dalam tubuh PKK itu;

bahwa saksi IV. Da I Mooduto setelah didengar atas keterangannya di bawah sumpah, menyatakan bahasa ia tidak mengetahui dengan pasti lagi apa yang telah diceritakannya kepada saksi I. Usman Kamba dan menegaskan lagi bahwa ia bukan salah satu anggota dewan pemeriksa dari PKK Dati II Gorontalo;

bahwa pernah ia saksi dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Gorontalo dalam hal ini sdr. Makahanap, yakni diperiksa karena ada pelaporan terhadap dirinya pernah membeli sebanyak 72.000 lembar karong, di mana laporan tersebut telah dibantah dengan keras, dan mungkin inilah yang telah dapat diceriterakan kepada saksi Usman Kamba tersebut;

Menimbang, bahwa setelah keterangan saksi-saksi ini dipertemukan satu pada lainnya (dikomprotir) di muka sidang, maka kami berpendapat, bahasa kesaksian keterangan pelaporan tersebut sama sekali tidak terdapat atau mengandung hal-hal yang nyata dan positif, sehingga menurut hukum keterangan pelaporan sedemikian ini adalah sangat diragukan;

bahwa dapat diperbenarkan pernah terjadi jual beli atas karong-karong rusak (afkeur) sebanyak 5000 lembar milik PKK tersebut oleh terdakwa V. Soleman Dengo, di mana setelah diselidiki seperlunya, ternyata jual beli tersebut adalah dengan persetujuan saksi H.A. Laya sebagai Administrateur PKK tersebut, sesuai dengan nota tgl. 9 September 1963 dan memorandum tgl. 11/9-1963 dan kemudian difatureer tgl. 11/0-1963 itu juga di bawah faktur no. 186/1, sedangkan harganya sejumlah Rp. 150.000,- ada ternyata dalam buku-Kas Pemasukan atas nama Tony Ginsu sebagai iparnya terdakwa Soleman Dengo;

bahwa peng-atas namakan dari Tony Ginsu tersebut, di muka sidang telah dapat dijelaskan oleh terdakwa V. Soleman Dengo dengan penjelasan, bahasa adalah yang menemui serta melaksanakan jual beli terhadap karong-karong itu, dengan administrateur H.A. Laya sedangkan pelaksanaan selanjutnya diwakilkan kepada iparnya Tony Ginsu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah kami memperoleh penjelasan dari saksi H.A. Laya bahwa Soleman Dengo-lah yang sebenarnya melaksanakan pembelian karung-karung tersebut, maka kami menarik kesimpulan dan berpendapat, bahwa hal sedemikian itu biasa saja terjadi dalam dunia perdagangan;

Menimbang, bahwa pemakaian atas dua nama yang berlainan dalam hal ini Soleman Dengo atau M. Soleman yang telah membawa perhatian besar dalam persidangan, di mana diperoleh penjelasan langsung dari terdakwa V. yang bersangkutan, bahwa namanya Soleman Dengo juga sama halnya dengan M. Soleman, menurut hemat kami adalah soal biasa saja, karena setelah diadakan penyelidikan baik terhadap tanda-tanda penerimaan (kwitansi-kwitansi), faktur-faktur sementara atau tetap maupun dalam pembukuan, tidaklah ternyata dan terbukti bahwa pemakaian atas dua nama tersebut ini mengakibatkan kerugian baik dari pihak PKK sendiri ataupun dari pihak orang lain;

bahwa saksi Aadun Maliki yang memuat karung-karung yang diheli oleh terdakwa V. Soleman Dengo kerumahnya dan menurut keterangannya bahasa ke-25 bal karung tersebut antara 3 atau 4 hari saja yaitu pada bulan Oktober 1963 dimuatnya kembali ke gudang PKK Talumolo, di mana pada ketika itu terjadi kecelakaan tertindasnya seorang buruh dengan karung tersebut;

bahwa keterangan saksi ini telah dibantah keras oleh terdakwa V. Soleman Dengo dengan penjelasan bahwa benar saksi Adun Maliki ada memuat karung-karung bekas pakai yang telah dijualnya kepada PKK, sedangkan pemuatan karung-karung itu berlaku pada bulan Desember 1963 di mana seorang buruh mendapat celaka yaitu tertindas oleh karung, keterangan mana dapat diteguhkan oleh keterangan terdakwa II. Sode Ibrahim;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Adun Maliki tersebut selain dari ia berdiri sendiri, juga tidak mengetahui dengan pasti apakah karung-karung yang dimuatnya itu adalah karung-karung rusak masih keadaan baru, maka menurut pendapat kami keterangan sedemikian itu menurut hukum adalah sangat lemah;

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan kami secara meningkat ialah, yang penting dan utama harus diadakan penyelidikan serta pembuktiannya, apakah di dalam tubuh Pusat Koperasi Kopra Dati II Gorontalo benar-benar ada penyalahgunaan jabatan atau penyelewengan uang-uang milik P.K.K. tersebut untuk memperkaya diri sendiri (korupsi) ataupun ada pemalsuan atau penggelapan dilakukan oleh terdakwa-terdakwa sebagai mana ternyata pada tuduhan yang dituduhkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa mengalir dari keterangan saksi-saksi yang didengar di bawah sumpah di muka persidangan, saksi-saksi mana ialah Husain A. Maija, Idris Badu, Kadir Tangabu, Abdul Karim Nusi, Tahir Sunal, masing-masing sebagai Administrateur, Anggota Dewan Pemeriksa, Kepala Seksi bagian karung, Kepala Pembukuan dan Kassier pada P.K.K. tersebut, juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi lain di bawah sumpah sebagaimana tertera dalam berita acara, demikian pula disesuaikan dengan bukti-bukti yang diajukan, baik dari buku stok karung, tanda-tanda penerimaan sementara dan tetap, maupun dalam buku-buku kas Pemasukan dan Pengeluaran, tidaklah ternyata atau terbukti menurut hukum, bahwa ada penyelewengan uang atau korupsi ataupun kehilangan karung dalam tubuh Pusat Koperasi Kopra Dati II Gorontalo tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena mana tidak ada sesuatu kenyataan kesaksian ataupun keterangan yang dapat menghasilkan pembuktian atas kesalahan-kesalahan dari para terdakwa itu;

Menimbang, bahwa kenyataan tak ada penyelewengan atau korupsi ataupun kehilangan karung dalam tubuh P.K.K. tersebut, maka dengan sendirinya juga tak terbukti bahwa ada pemalsuan atau penggelapan yang dilakukan oleh para terdakwa I, II, III dan IV;

Menimbang pula, bahwa sedang tidak terbukti kesalahan terdakwa-terdakwa I, II, III dan IV., maka dengan sendirinya pula tak ada kejahatan yang bersifat "tadah atau sekongkol" yang dilakukan

oleh terdakwa V.

Menimbang, bahwa terhadap tuduhan penggelapan karung sebanyak 470 dan 720 lembar oleh terdakwa VI. Edy Karim, tidak terbukti sepanjang hukum dan keyakinan, karena menurut keterangan saksi-saksi Doru Hadju dan Abdulrazak Lagonah di bawah sumpah, bahwa karung-karung tersebut adalah karung-karung yang tidak bisa dipakai lagi (rusak) dan karung-karung mana telah diberikan kepada terdakwa VI sebagai hadiah, karena jasa-jasanya terhadap Koperasi Kopra tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas ini, maka kami berpendapat, bahwa tidak terbukti sepanjang hukum dan keyakinan, terdakwa telah bersalah melakukan kejahatan-kejahatan sebagaimana yang telah dituduhkan kepada mereka, dan oleh karenanya mereka patut dibebaskan dari tuduhan-tuduhan itu;

Menimbang, bahwa terhadap sejumlah 7030 lembar karung yang dimajukan sebagai tanda-bukti dalam perkara ini, berhubung dengan pembebasan kepada para terdakwa, maka olehnya harus dikembalikan dengan segera kepada yang berhak atasnya ialah terdakwa V. Soleman Dengo, sedangkan buku-buku Kas dan bundelan surat-suratan dikembalikan kepada Pusat Koperasi Kopra Dati II Gorontalo.

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa nyata dibebaskan dari tuduhan yang dipertanggungkan kepada mereka, maka biaya perkara harus dipikulkan kepada Negeri.

Memperhatikan pasal 313, 378 dari Reglemen Indonesia yang dibaharui Lembaran Negara 1941 No. 44 jo Undang-undang Darurat tahun 1951 No. 1 ;

MENGADILI :

Menerangkan kesalahan dari terdakwa-terdakwa pada awalan ini:

- I. Bahruddin Kumadji.
- II. Sode Ibrahim.
- III. Husana Dilato.
- IV. Moki Djaafar.
- V. Soleman Dengo.
- VI. Edy Karim.

tiada terang syah sepanjang hukum dan keyakinan;

Membebaskan mereka lantaran itu dari tuduhan-tuduhan yang dipertanggungkan kepada mereka;

Mempertanggungkan biaya dalam perkara ini kepada Negeri;

Memerintahkan pengembalian tanda-bukti sejumlah 7030 lembar

karung kepada yang berhak atasnya yakni terdakwa V. Soleman Dengo, serta buku-buku kas dan bundelan surat-suratan dikembalikan kepada Pusat Koperasi Kopra Dati II Gorontalo.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Negeri pada hari REBU, tanggal 7 Juli 1965 dengan J.N. Jassin, Hakim Pengadilan Negeri, sebagai Ketua, O. Rahim dan M.S.A. Ottoluwa SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Ketua tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan M. Monoarfa, Panitera Pengganti l.b. dan terdakwa-terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
t.t.d. O. Rahim.
t.t.d. M.S.A. Ottoluwa SH.

Ketua,
t.t.d. J.N. Jassin.

Panitera,
t.t.d. M. Monoarfa.